

DR. BADRI KHAERUMAN, M.Ag

Membangun

KEADILAN EKONOMI

PENGUATAN KONSEP ISLAMI DAN PENGEMBANGAN USAHA



LP2M UIN BANDUNG

Membanjir

**KEADILAN EKONOMI: PENGUATAN KONSEP ISLAMI
DAN PENGEMBANGAN USAHA**

Penulis: Dr. Badri Khaeruman, M.Ag

Cetakan Pertama: Oktober 2019

Diterbitkan oleh: Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M) UIN Bandung:

Gedung Lecture Hall Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Bandung Jawa Barat.

40614 Tlp. +62 (022) 780 0525 & + 62 (022) 780 3936

<http://lp2m.uinsgd.ac.id/>

ISBN 978-623-6070-91-8 (PDF)



9 786236 070918

Kata Pengantar

Puji syukur al-hamdulillah penulis panjatkan kepada Yang Maha Pencipta, karena atas anugerah-Nya jua naskah ini akhirnya dapat ditemukan kembali setelah hilang karena salah simpan.

Naskah yang diberi judul Membangun Keadilan Ekonomi: Penguatan Konsep Islami dan Pengembangan Usaha, semula merupakan makalah penulis untuk diskusi tentang penguatan ekonomi syariah dari aspek hukum beberapa tahun yang lalu, yang diselenggarakan oleh badan amil zakat, shadaqah dan infaq, sebuah masjid raya di Bandung.

Naskah ini kemudian direvisi dan ditambah isinya dengan tujuan untuk menambah wawasan dalam pengembangan usaha dengan konsep ekonomi Islami terutama usaha perbankan syariah yang kian hari terus berkembang khususnya di Jawa Barat.

Kebetulan di UIN Bandung, ada fakultas baru yang khusus menstudi bidang ekonomi yang berbasis syari'ah, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis sehingga naskah ini menjadi sebagai pengantar menuju pengembangan ekonomi syariah di masa depan.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih khususnya kepada LP2M UIN Bandung

dan kepada pihak-pihak yang membantu terbitnya buku ini. Semoga sumbangsih dan perannya, mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Semoga pula buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 20 Oktober 2019.

Badri Khaeruman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — i

Daftar Isi — iii

Bagian I:

PENDAHULUAN — 1

Bagian II:

**PRINSIP-PRINSIP KEADILAN SOSIAL
DALAM ISLAM— 21**

Bagian III:

**MEMBANGUN PEREKONOMIAN
DENGAN KONSEPSI ISLAM —37**

- A. Sendi-sendi Ekonomi Islam — 41
- B. Prinsip-prinsip Pengembangan Ekonomi Islam — 49
- C. Praktik dan Tujuan Ekonomi Islam — 60
- D. Kemiskinan dan Pemerataan sebagai Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Islam — 69
- E. Perbankan Syariah dan Perkembangannya-79
 - 1. Sejarah Perbankan Syariah — 79
 - 2. Prinsip Perbankan Syariah — 81
 - 3. Produk Perbankan Syariah — 82
 - a. Jasa untuk peminjaman dana — 82
 - b. Jasa untuk penyimpanan dana — 83
 - c. Tantangan pengelolaan dana — 83
 - d. Penghimpunan dana — 83
 - 4. Peran Perbankan Syariah — 88

Bagian IV:

**NILAI-NILAI AJARAN ISLAM UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT — 97**

- A. Aktualisasi Ajaran Islam untuk Solidaritas Sosial — 97
- B. Makna Sosial Idul Fitri — 102
- C. Fungsionalisasi Zakat dalam Pencapaian Kesejahteraan Sosial — 109
- D. Nilai-nilai Sosial dalam Zakat Fitrah — 126
- F. Pengembangan Harta Benda Wakaf: Menyambut UU No. 41 Th. 2004 — 132

Bagian V:

P E N U T U P — 137

DAFTAR PUTAKA — 149

Bagian Pertama:

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi seperti yang dialami oleh sebagian negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia tahun-tahun belakangan ini, sesungguhnya tidak saja berarti suatu kondisi sosial ekonomi yang lemah, memprihatinkan dan instabil, tetapi juga disebabkan oleh persoalan serius di mana sendi-sendi ekonomi (aktifitas, kapital, institusi dan pasar) dilanda kerawanan dan krisis ekonomi berkelanjutan. Krisis juga sebenarnya berarti sebuah stimulus untuk terjadinya perubahan struktur sosial yang fundamental atau sebuah *stepping stone* untuk mendorong perubahan sosial politik lebih bermakna.

Menurut Muflich Hasbullah,¹ krisis ekonomi telah menciptakan restrukturisasi besar-besaran dalam bidang ekonomi. Setelah krisis moneter hampir menyeret Thailand, Malaysia dan Indonesia pada hiperinflasi dan kebangkrutan, negara-negara Asia Tenggara tersadarkan tentang masih lemahnya basis-basis institusi ekonomi mereka. Betapa satu kawasan yang pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 7 persen pertahun ternyata hanya perkasa di atas fondasi yang rapuh. Pembangunan ekonomi yang mengandalkan pada *foreign loans* dan *foreign investment* ternyata hanya menciptakan Asia

¹ Lihat makalah, *Krisis Sosial Ekonomi dan Revivalisme Islam*, Bandung, 9 September, 1999.

Tenggara seekor raksasa berkaki lumpuh. Bukan saja tingkat ketergantungan pada lembaga-lembaga keuangan internasional semakin menguat bahkan hampir tak bisa lepas darinya. Hal itu dibuktikan dengan tak sanggupnya negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan krisis ekonominya secara internal, dengan kata lain mustahil tanpa campur tangan kekuatan supranegara seperti IMF dan Bank Dunia. Namun lebih dari itu, seperti di Indonesia, ketergantungan itu dirusak oleh tradisi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dikembangkan birokrasi selama kurun waktu yang lama oleh pemerintahan berkuasa sebelumnya.

Namun krisis ekonomi di Indonesia sesungguhnya dapat dilihat sebagai satu fase transisi di mana bangsa berpenduduk Muslim sekitar 200 juta ini memasuki satu era baru sejarahnya. Krisis telah mengakhiri suatu rezim dan memunculkan era reformasi, yang kendati belum seideal harapan masyarakat yang menghendaknya reformasi secara total, telah membawa perubahan-perubahan besar dalam kehidupan ekonomi dan politik. Jatuhnya Soeharto telah mengakhiri tradisi kekuasaan feodal dan berganti ke pemerintahan yang demokratis. Bila semasa Orde Baru kekuasaan sangat sentralistik, maka di era reformasi posisi politik pemerintah cenderung semakin lama semakin melemah. Kemunculan partai-partai baru membuat saluran politik rakyat yang kompleks kini tertampung lebih baik. Otonomi daerah dikembangkan dan legalisasi aktifitas demonstrasi telah menguatkan posisi rakyat semakin kuat da-

lam *bargaining power* dan kontrol kekuasaan. Tekad pemberantasan korupsi, kebebasan pers, terbukanya wacana publik yang sangat lebar, restrukturisasi ekonomi dan rekapitalisasi perbankan, upaya pembongkaran pelanggaran-pelanggaran HAM dan pemulihannya, serta pengupayaan supremasi hukum kini semua menjadi agenda utama pemerintahan dewasa ini.

Akan tetapi tantangan terberat bagi pemerintahan Indonesia sesungguhnya terletak pada tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang dialami oleh masyarakat di negeri ini. Bank Indonesia (BI) memperkirakan tantangan terbesar perekonomian tahun 2006 adalah mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan masih tinggi karena terbatasnya pertumbuhan ekonomi. Sektor yang cenderung padat modal, bukan padat karya, masih mendominasi. Demikian dikemukakan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah dalam sambutannya pada seminar bertajuk "*Wajah Ekonomi Indonesia 2006: Menghadapi Tantangan, Mencari Peluang*" yang berlangsung di Jakarta, Senin (20/3).²

Dalam kesempatan itu, Gubernur BI juga menyampaikan kekhawatirannya jika melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan, jumlah pengangguran per Oktober 2005 mencapai 11,6 juta jiwa atau 10,84 persen

² Lihat "Pengangguran, Tantangan Ekonomi Terbesar 2006," dalam: *Suara Pembaruan Daily*: 20 Maret 2006.

dari jumlah penduduk Indonesia atau meningkat dari 9,86 persen pada Agustus 2005.

"Upaya penyediaan lapangan kerja juga lebih banyak terkendala oleh ketentuan ketenagakerjaan yang dipandang kaku," kata Burhanuddin.

Hasil survei Bank Dunia menunjukkan pasar tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat kekakuan yang tinggi. Indeks kekakuan pasar tenaga kerja Indonesia sebesar 57 atau jauh melebihi Malaysia dengan indeks 3 dan China 30.

Faktor penghambat lain, menurut Burhanuddin, yakni kecenderungan meningkatnya upah buruh. Meningkatnya upah buruh ini yang membuat pemilik modal relatif melakukan substitusi tenaga kerja dengan mesin, sehingga elastisitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi menurun.

Dengan kondisi ini, tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan semakin meningkat. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin tercatat 35,1 juta jiwa dan penduduk hampir miskin 26,2 juta jiwa. Sedangkan, ketimpangan pendapatan yang meningkat tercermin dari gini ratio tahun 2005 sebesar 0,343 atau naik dari 0,288 pada tahun 2002.

Selain masalah pengangguran dan kemiskinan, tantangan lain di bidang ekonomi, kata Burhanuddin, yakni melambatnya investasi dan bagaimana mempersiapkan diri dari risiko-risiko eksternal yang berpotensi muncul kembali.

Untuk masalah investasi, dia menilai, hal ini tidak cukup diatasi dengan upaya penyesuaian pelaku ekonomi terhadap dampak tingginya inflasi, depresiasi nilai tukar rupiah, dan ketersediaan sumber pembiayaan.

"Yang lebih krusial adalah upaya penyelesaian berbagai masalah struktural seperti efisiensi birokrasi, regulasi di bidang ketenagakerjaan, dan masalah perpajakan," kata Burhanuddin.

Hasil survei BI menunjukkan, permasalahan utama dalam upaya mendorong peningkatan investasi adalah besarnya biaya yang ditimbulkan dari pungutan tidak resmi dengan persentase 60 persen dari permasalahan yang ada. Hal itu didukung hasil survei Bank Dunia yang menunjukkan lamanya prosedur pendirian usaha baru yakni 151 hari. Rendahnya efisiensi birokrasi perizinan itu jauh di atas Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 30 hari.

Di sektor perpajakan, hasil survei Bank Dunia juga menunjukkan pembayaran pajak di Indonesia relatif tinggi yaitu sebanyak 52 jenis dalam setahun. Hasil survei itu jauh melebihi Malaysia yang hanya 28 jenis. Akibatnya, nilai pajak yang harus dibayar investor lebih tinggi 38 persen dari keuntungan kotor, jauh melebihi Thailand yang tercatat 29,2 persen. Selain itu, masih ada keterlambatan restitusi pajak dan realisasi nilai yang diterima hanya 87 persen dari yang diklaim.

Mengenai dampak eksternal, Burhanuddin mengingatkan, kenaikan harga minyak dan ketidakseimbangan ekonomi global masih perlu dicermati. Dinamika tersebut sedemikian penting seiring dengan derasny arus modal jangka pendek ke dalam negeri.

"Tidak dapat dipungkiri arus modal masuk jangka pendek ini bisa menimbulkan dilema, karena sesuatu berbahaya jika berlebihan," kata Burhanuddin. Modal jangka pendek, tegas Burhanuddin, sangat mudah berbalik, sebab itu menuntut konsistensi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Tentang data-data kemiskinan dan pengangguran yang dialami oleh penduduk Indonesia dewasa ini, kita lihat misalnya dari beberapa penelusuran media yang mengungkap persoalan-persoalan tersebut. Provinsi Jawa Barat (Jabar) misalnya, sebagai provinsi terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, seperti dilaporkan oleh *Harian Umum Pikiran Rakyat*,³ koran beroplah terbesar di provinsi ini, melaporkan bahwa terdapat 2,2 juta warga Jabar masih jadi penganggur dan 9,5 juta lainnya tergolong masyarakat miskin.

Dalam laporannya, *Pikiran Rakyat* mengungkap bahwa tingkat pengangguran di Jawa Barat masih tinggi yakni mencapai angka 2,2 juta jiwa untuk kategori pengangguran terbuka. Masih tingginya angka pengangguran ini diakui

³ Lihat, *HU Pikiran Rakyat*, edisi Jum'at, 25 Februari 2005.

Gubernur Jabar Danny Setiawan saat ditemui wartawan, usai peringatan Tahun Baru Muharram di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Bandung.

Menurutnya, kemampuan Pemda dalam penanggulangan pengangguran ini masih terbatas. "Untuk itu, kami mencanangkan program yang sekaligus memanfaatkan keberadaan pelaku ekonomi di Jabar untuk mengatasi masalah pengangguran iri," katanya.

Namun dalam pengamatan para aktivis sosial, ternyata angka kemiskinan melampaui apa yang dinyatakan oleh Pemda tersebut. Jumlah warga miskin di Jawa Barat saat ini diperkirakan bisa mencapai 50% dari 38 juta penduduk.⁴ Penambahan itu terjadi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 1 Oktober tahun lalu. Kenaikan harga BBM ini telah mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat akibat harga berbagai kebutuhan yang melonjak tajam.

Kemiskinan ini juga terjadi akibat imbas dari pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di kalangan industri, akibat beban biaya produksi yang tinggi. Demikian dikemukakan pengamat sosial dari Unpad, Budi Radjab dan pengamat ekonomi dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung, Coki Ahmad Syahwier.

Menurut Budi, sebelum diumumkan kenaikan harga BBM, jumlah keluarga miskin berdasarkan data BPS untuk subsidi kompensasi

⁴ Lihat, Laporan *HU Pikiran Rakyat*, Jum'at 14 Oktober 2005.

BBM sebanyak 2.573.522 atau jika dikalikan setiap keluarga empat orang, jumlah orang miskin sebanyak 10.294.088 jiwa. Artinya, jumlah warga miskin itu didata BPS sebelum 1 Oktober 2006 dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan, salah satunya adalah pendapatan satu keluarga di bawah Rp 700.000,00/bulan.

Setelah harga BBM naik, tambah Coki, nilai pendapatan yang dijadikan ukuran keluarga miskin menjadi Rp 1 juta/bulan, disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang rata-rata 30-50%, maka keluarga yang berpendapatan Rp 1.000. 000/bulan sekarang masuk kategori keluarga miskin.

Budi dan Coki sependapat, bahwa mereka yang berpenghasilan dari Rp 700.000,00/bulan-Rp 1 juta/bulan, sudah masuk garis kemiskinan. "Jadi, jumlah orang miskin di Jawa Barat, akan naik dan diperkirakan jumlahnya bisa mencapai 50% dari jumlah penduduk Jawa Barat," kata Budi.

Menurut Budi, faktor lain yang mendukung terjadinya penambahan orang miskin adalah dampak dari PHK di sektor industri. Menurut analisis Coki, kenaikan harga BBM saat ini telah memukul dunia usaha dan mengakibatkan biaya produksi cukup tinggi. "Saya memperkirakan, PHK besar-besaran akan terjadi di Jawa Barat pada bulan Desember-Januari mendatang, karena pengusaha tidak sanggup lagi memikul biaya produksi yang tinggi," tukasnya.

Coki mengakui, dirinya berbicara dengan sejumlah pengusaha. Kata mereka, untuk mempertahankan usaha mereka bisa berjalan terus, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi buruh atau tenaga kerja. Artinya, pilihan yang akan dilakukan pengusaha yakni mem-PHK buruh atau karyawan. "Sektor tekstil, manufaktur, dan perdagangan, saya perkirakan akan banyak mem-PHK karyawannya," tambahnya.

Jika langkah PHK itu terjadi, maka menurut Budi, mereka yang sebelumnya tidak terdata masuk keluarga miskin karena memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, setelah berhenti bekerja, sudah masuk keluarga miskin.

Belum lagi, lanjutnya, kontribusi kemiskinan dihitung dari Upah Minimum Regional (UMR) yang diberlakukan untuk para buruh atau karyawan di Jawa Barat yang masih di bawah rata-rata Rp 700.000,00/bulan. Artinya, para buruh atau pekerja aktif di perusahaan saat ini, dengan upah yang mereka terima setiap bulan, sebenarnya sudah masuk dalam kategori miskin.

Faktor-faktor tersebut, dalam pandangan Budi dan Coki, merupakan instrumen yang mendukung bertambahnya orang miskin di Jawa Barat. Dari semula hanya 10,2 juta jiwa (2.573.522 Gakin) atau lebih kurang 30% dari 38 juta jiwa penduduk Jawa Barat, maka ke depan diprediksikan mencapai 50% dari total jumlah penduduk Jawa Barat.

Budi dan Coki mengatakan, tingkat rasionalitas instrumen yang membuat mereka memprediksi jumlah orang miskin bertambah di Jawa Barat, bisa diperdebatkan dan dipertanggungjawabkan. Karena, instrumen yang mendorong pertambahan kemiskinan itu, dapat diuji secara ilmiah. "Bahkan, masyarakat umum merasakan kondisi seperti itu setelah kenaikan harga BBM," ujar Coki.

Persoalan yang dihadapi masyarakat Jawa Barat ternyata bukan hanya masalah kemiskinan dan pengangguran saja, tetapi terus berimbas pada persoalan-persoalan sosial lainnya. Misalnya persoalan gizi buruk yang menimpa masyarakat kecil pedesaan di Jawa Barat. Salah satu contoh, seperti terungkap dalam laporan Harian Kompas,⁵ yang menulis bahwa gizi buruk masih menjadi masalah sosial dan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Tahun 2005, hampir satu persen balita di Jabar dinyatakan mengidap gizi buruk. Relatif tingginya kasus gizi buruk di provinsi ini berkorelasi dengan tingkat kemiskinan.

Gizi buruk adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Seorang penderita gizi buruk tidak mendapatkan minimum angka kecukupan gizi (AKG).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, tahun 2005 sebanyak 25.735 balita berstatus gizi buruk. Lima balita di antaranya

⁵ Lihat Edisi Sabtu, 19 Agustus 2006.

kurang protein (kwasiorkor), 102 balita kekurangan kalori (marasmus), dan busung lapar (marasmus kwasiorkor) 20 balita.

Dari 25 kabupaten/kota di Jabar, Kabupaten Cirebon adalah daerah dengan kasus gizi buruk tertinggi, mencapai 14,5 persen dari total kasus gizi buruk di Jabar. Tahun 2005, sebanyak 3.740 balita di wilayah ini berstatus gizi buruk.

Berikutnya, Kabupaten Bandung dan Cianjur, masing-masing 3.653 dan 1.708 kasus. Adapun kasus gizi buruk terkecil terdapat di Kota Cimahi dan Kota Banjar.

Tingginya kasus gizi buruk balita di sejumlah daerah terkait dengan daya beli masyarakat yang makin berkurang, terutama di kantong-kantong kemiskinan di Jabar. Tiga daerah tersebut merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar, saat ini di Jabar terdapat 2,9 juta rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin terbanyak di Kabupaten Bandung, 281.624 keluarga.

Kasus gizi buruk juga berpotensi banyak ditemukan di wilayah pantai utara (pantura) Jabar. Pasalnya, rumah tangga miskin di wilayah ini termasuk 10 besar tertinggi di Jabar.

Misalnya, Kabupaten Cirebon memiliki 203.203 rumah tangga miskin, serta ditemukan pula banyak kasus gizi buruk pada balita.

Begitu pula Kabupaten Karawang, terdapat 190.548 rumah tangga miskin. Hingga triwulan I tahun 2006, tercatat 15 balita meninggal karena gizi buruk. Selain itu, lebih dari 2.000 balita berstatus gizi buruk.

Selain di pantura, wilayah selatan Jabar, seperti Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, juga rawan gizi buruk. Lebih dari 300.000 keluarga miskin terdapat di dua daerah itu.

Relatif tingginya kasus gizi buruk di Jabar merupakan tantangan pembangunan kesehatan. Tanpa program terpadu, perbaikan gizi, dan peningkatan kesejahteraan warga, bisa jadi dalam dua dasawarsa mendatang mereka menjadi generasi yang hilang.

Dengan melihat data-data kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial lainnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dewasa ini, maka adanya tuntutan keterlibatan semua pihak dalam mengatasi ketimpangan sosial itu menjadi suatu keharusan. Karena hanya mengandalkan pada kemampuan pemerintah saja, menjadi mustahil kesenjangan itu menjadi teratasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bukan saja berfungsi untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan, tapi juga untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial yang semakin tinggi. Tanggung jawab masyarakat pada gilirannya akan berubah menjadi kekuatan penggerak untuk memelihara kelanjutan (*sustainability*) pembangunan, sehingga pembangunan

akan menjadi milik semua komponen dalam masyarakat, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa di antara problem penting pelaksanaan pembangunan di masyarakat adalah masih rendahnya upaya memelihara pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Tidak berfungsinya fasilitas publik secara maksimal, banyak diakibatkan oleh rendahnya fungsi ideal, dan tidak terjaganya fungsi tersebut. Bantuan pembangunan yang kurang diapresiasi sebagai stimulasi juga dapat menciptakan ketergantungan yang tidak menguntungkan khususnya bagi masa depan masyarakat sendiri.

Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan publik, juga merupakan kenyataan yang dialami hampir semua negara di dunia. Sehingga untuk melengkapi keterbatasan itu diperlukan upaya menggal potensi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan arah yang telah ditetapkan. Dalam konteks interdependensi antara masyarakat dan pemerintah inilah partisipasi menjadi kunci pencapaian pemerataan di berbagai bidang kehidupan.

Buku ini mencoba berpartisipasi dalam mengatasi berbagai ketimpangan sosial, terutama difokuskan pada penguatan bidang ekonomi melalui konsepsi Islam sebagai ajaran. Mengingat pertumbuhan ekonomi syaria'ah saat ini sangat pesat dan diminati oleh mayoritas penduduk negeri ini.

Dalam pandangan ekonomi Islam, An-Nabhani⁶ mengatakan bahwa kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan yang menimpa individu sehingga yang harus dilakukan adalah menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya serta mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, dan jalan untuk mencapainya adalah dengan menciptakan distribusi ekonomi yang adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kebijakan yang berpijak pada pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan yang membatasi peredaran harta di kalangan orang-orang kaya saja. Allah SWT dengan tegas melarang peredaran harta dengan cara seperti ini, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

“... Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”

Distribusi harta yang adil dalam Islam antara lain ditempuh dengan jalan berikut ini:

Hukum kepemilikan umum. Setiap individu hanya boleh memiliki suatu kekayaan jika syara' mengijinkannya. Jika suatu kekayaan termasuk dalam katagori kepemilikan umum maka

⁶Lihat Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (an-Nizham al-Iqtishadi), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. V, Surabaya: Risalah Gusti, 2000, hlm. 21-23, lihat dalam tulisan Hidayatullah Muttaqin: Pertumbuhan Ekonomi tidak Mampu Mengatasi Kemiskinan, 20/10/2003, www.e-Syariah.ORG.

individu atau swasta – termasuk negara – dilarang untuk memilikinya. Kekayaan tersebut adalah milik umat dan setiap warga negara berhak mendapatkan manfaat dari kepemilikan umum tersebut. Pengelolaan kepemilikan umum diserahkan kepada negara menurut ijtihad khalifah sebagai wakil umat. Hukum kepemilikan umum ini dengan sendirinya menghalangi sekelompok individu menguasai kekayaan yang terdapat dalam negara.

Hal ini berbeda dengan perekonomian Kapitalis yang diterapkan di Indonesia. Dengan metode pertumbuhan ekonomi yang berdiri di atas pilar kebebasan kepemilikan, kontrol kekayaan nasional berada di tangan para investor asing dan investor lokal. Akibatnya sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan yang ada di negerinya sendiri. Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber daya alam. Sebagian besar sumber daya alam Indonesia telah dieksploitasi untuk kepentingan para investor asing dan lokal. Kekayaan yang melimpah dari hasil minyak bumi, gas alam, tambang emas dan perak, hutan, dan lain-lainnya tidak dapat dinikmati rakyat Indonesia sendiri.

Dalam Islam pemanfaatan kepemilikan harus memiliki tujuan dan tujuan tersebut harus sesuai syara'. Kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga yang ditanggungnya. Kewajiban membayar zakat bagi yang telah sampai nisabnya. Zakat ini diberikan kepada orang yang termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kewajiban menolong tetangga yang

sedang ditimpa kesulitan. Islam mendorong kaum muslimin untuk memberikan shadaqah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Islam mendorong kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Metode pemanfaatan harta yang diwajibkan dan dianjurkan syara' tersebut dengan sendirinya mengalirkan harta dari orang-orang kaya ke orang-orang miskin dan yang membutuhkannya. Dalam Kapitalisme setiap orang bebas membelanjakan hartanya apakah di jalan yang bermanfaat atau tidak, apakah yang dibelanjakannya bersifat merusak masyarakat atau tidak. Juga mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin, kecuali mereka memiliki kepentingan terhadap kaum lemah tersebut.

Kebijakan ekonomi negara Islam. Kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan kepada setiap individu warga negara Islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh dan memberikan dorongan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuan mereka.

Negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok akan makanan, pakaian dan perumahan setiap warga negara yang tidak mampu secara tuntas. Dengan kebijakan ini tidak ada orang miskin yang dibiarkan terlantar tanpa tempat tinggal, pakaian dan makanan secukupnya. Negara juga menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma kepa-

da setiap warga negara Islam tanpa memandang miskin atau kaya, kulit hitam atau putih, dan orang Islam atau non Islam. Mereka semua berhak mendapatkan pelayanan negara tersebut.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota masyarakat maka kemiskinan setiap individu terpecahkan. Dari sisi terjaminnya pendidikan bagi setiap warga negara akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki keahlian dan skil tertentu yang sangat bermanfaat bagi mereka untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja.

Memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara belum cukup, karena kesejahteraan warga harus ditingkatkan hingga memungkinkan bagi mereka memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Karenanya negara berkewajiban mendorong mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bentuk dorongan ini antara lain kewajiban khalifah menyediakan lapangan kerja bagi warga negara.

Ada kalanya seseorang belum mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan informasi tentang lowongan kerja. Untuk itu negara berkewajiban mencari pekerjaan bagi mereka dengan menyediakan informasi badan-badan pemerintahan dan perusahaan milik negara dan swasta yang membutuhkan karyawan. Intinya di sini negara berperan secara langsung sebagai penghubung antara pencari kerja dengan yang membutuhkan tenaga kerja.

Individu-individu tertentu memiliki keahlian khusus dalam bidang bisnis, riset, teknologi informasi, mesin, dan lain-lainnya, tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan keahliannya. Untuk itu negara harus memberikan bantuan modal kepada mereka. Khalifah dalam kebijakan ini dapat memberikan bantuan modal misalnya dalam bentuk subsidi, pinjaman tanpa bunga dan pembiayaan *mudharabah*.

Dengan bekerjanya seseorang dalam berbagai bidang usaha, maka memungkinkan bagi dia untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya serta keluarga yang ditanggungnya secara *ma'ruf*.

Setiap orang secara alamiah memiliki kecerdasan, kekuatan fisik dan kemampuan modal yang berbeda sehingga tidak setiap orang mampu memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Karena itu negara melakukan intervensi dalam perekonomian mengatur distribusi kekayaan agar setiap orang minimal mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya.

Hal ini berbeda dengan perekonomian Indonesia yang melepaskan distribusi kekayaan pada mekanisme ekonomi yang timpang. Pemerintah dari waktu ke waktu semakin melepaskan peranannya dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Berbagai subsidi dicabut dan dikurangi. BUMN-BUMN -- termasuk perusahaan milik daerah -- yang menguasai hajat hidup orang banyak diprivatisasi. Sektor-sektor ekonomi satu persatu dibuka untuk investor asing.

Semua kebijakan tersebut dilakukan demi efisiensi, kelancaran dan persaingan yang kompetitif dalam mekanisme pasar – yang sebenarnya telah terdistorsi – dengan tujuan pelaksanaan pasar bebas. Pasar bebaslah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membagi secara efisien kekayaan ke tangan masyarakat. Pandangan keliru ini membiarkan distribusi kekayaan berdasarkan kekuatan tingkat harga – kekuatan permintaan dan penawaran – sehingga hanya orang-orang kaya saja yang dapat menjangkau harga dan mendapatkan berbagai kebutuhannya. Sementara orang-orang miskin yang tidak dapat menjangkau harga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya pencabutan subsidi pendidikan – dengan alasan otonomi kampus – oleh pemerintah menyebabkan hanya orang-orang mampu saja yang dapat memasuki perguruan tinggi.

Itulah kebijakan ekonomi Islam dalam menuntaskan kemiskinan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam memuliakan manusia sebagai “manusia” yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya. Sementara kebijakan ekonomi Kapitalis memuliakan “materi” dengan menjamin tercapainya produksi barang dan jasa secara maksimum. Islam menempatkan aspek produksi pada tataran pembahasan ilmiah dan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dengan tetap berpegang pada hukum syara’. Sedangkan Kapitalisme menempatkan aspek produksi pada

tataran sistem ekonomi sehingga ia - pertumbuhan ekonomi -- diletakkan di atas segalanya.

Bagian Kedua:
PRINSIP-PRINSIP KEADILAN SOSIAL
DALAM ISLAM

Al-Qur'an sebagai manifestasi kalam Tuhan merupakan kitab petunjuk moral yang komprehensif dan sempurna, untuk kebaikan manusia dan alam semesta.¹ Fitrah (suci) dan *hanif* (lurus dan benar) merupakan dasar kepribadian manusia, yang karena itu al-Qur'an mensyaratkan tatanan kehidupan itu ramah dan damai, karena berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan.

Puncak kasih sayang Tuhan atas manusia adalah diutusnya para nabi, yang di satu sisi mempunyai misi menyeru manusia kepada penyerahan diri, patuh-tunduk pada Tuhan.² Dan di sisi lain, adalah berkaitan dengan penegakan keadilan di muka bumi. Tuhan menegaskan:

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia bisa melaksanakan keadilan" (QS. al-Hadid, 57: 25).

Ayat ini menegaskan bahwa menegakkan keadilan adalah tujuan dan misi utama Nabi. Dengan demikian terdapat dua tujuan utama misi kenabian, yaitu, mengajak manusia untuk

¹ Lihat al-Qur'an, surat *al-Baqarah*, 2: 2, 97 dan 185.

² Lihat al-Qur'an, surat *al-Ahzab* 33: 45-46.

menyembah Allah, sekaligus memberantas kemusyrikan, dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memberantas kezhaliman.

Dengan merujuk pada ayat 25 surat al-Hadid di atas, jelas bahwa keadilan, dengan konsepsi sosialnya, merupakan tujuan diturunkannya para nabi.

Nasehat Ali bin Abi Thalib kepada Gubernur Mesir, Muhammad Ibnu Abi Bakar; Para duta Illahi adalah para penegak keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang telah merencanakan jalan kesempurnaan manusia bagi umat manusia.³

Ahmad Syafi'i Ma'arif⁴ memberikan ilustrasi yang cukup tajam mengenai keterkaitan antara iman kepada Allah dengan penegakan keadilan, sebagai berikut:

Paham tentang keesaan Allah itu menurut al-Qur'an punya implikasi doktrinal tentang kesatuan umat manusia. Manusia adalah satu keluarga. Dari prinsip monotheisme dan prinsip kesatuan umat manusia itu turunlah kemudian prinsip keadilan sosial ekonomi. Prinsip keadilanlah yang dapat merekat keutuhan sebuah keluarga. Tanpa keadilan konsep umat manusia sebagai satu keluarga akan tercabik-cabik dan berserakan.

³ Lihat buku, *Psikologi Islam*, Terj. Satrio Pinandito, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1994, hlm.102.

⁴ Lihat buku, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 23.

Dengan kata lain, kesatuan umat, persaudaraan dan prinsip keadilan sosial ekonomi adalah unsur-unsur keadilan sebagian penjabaran dari sistem kepercayaan pada satu Tuhan (tauhidullah). Dalam al-Qur'an Allah dikatakan Maha Adil, dan Dia menegakkan keadilan atas dasar bahwa keadilan adalah sifat positif yang dimilikinya. Al-Qur'an menegaskan:

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Ali Imran, 3: 18).

Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa Allah menyuruh berbuat adil atau bahwa Dia adalah pelaku keadilan. Pernyataan ini merupakan persoalan asasi yang diatasnya agama-agama samawi membangun hubungan manusia dengan Allah. Kemudian, perintah Tuhan untuk mendirikan keadilan yang didasarkan atas kualitas monoteistik prinsip keesaan Tuhan yang sesuai dengan ajaran Islam (tauhid), dengan tegas dikatakan dalam firmanNya:

Katakanlah "Tuhanku menyuruh menegakkan keadilan". Dan (Katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu disetiap sembahyang dan sembahlah Tuhanmu dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakanmu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali padanya (QS. al-A'raf, 7 : 29).

Ayat ini jelas mengandung perintah untuk menegakkan keadilan dalam segala hal, seperti halnya dalam shalat, yang hanya Tuhanlah yang mempunyai hak atas ibadah ini.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa iman terkait dengan keharusan berlaku adil. Karenanya penegakan keadilan adalah merupakan manifestasi perbuatan yang paling mendekati takwa atau keinsyafan diri manusia. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menjalan-kan (keadilan) karena Allah menjadi saksi de-ngan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap suatu kaum, mendorong kamu un-tuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Menge-tahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Maidah, 5: 8).

Al-adl yang dimaksud dalam ayat di atas adalah barometer timbangan kebenaran-kebe-naran yang diseimbangkan atau sikap mene-ngahi kebenaran-kebenaran atas dasar hak ke-benaran itu sendiri tanpa terhalangi oleh ikatan apapun. Karena keadilan adalah timbangan bagi kebenaran.

Nurcholis Madjid⁵ menegaskan bahwa ke-adilan imani terkait erat dengan ihsan, yaitu keinginan berbuat baik untuk sesama manusia

⁵ Lihat *Islam Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992, hlm. 115.

dengan tulus, karena manusia bertindak dihadapan manusia dengan tulus, karena manusia bertindak dihadapan Tuhan untuk menjadi saksi baginya, yang segala sikap lahir dan bathin tidak pernah jadi rahasia dihadapannya.

Dengan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa ihsan yang merupakan sikap keagamaan tertinggi sebagai konsekwensi dari keimanan kepada Allah yang memberikan landasan pada manusia untuk selalu berbuat adil dalam keseluruhan aktivitas kerja kehidupan umat manusia, berbuat kebajikan, dermawan, menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini ditegaskan dalam firmanNya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran (QS. an-Nahl (16) : 90).

Jika iman membawa konsekwensi kemutlakan hanya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka kebalikan dari itu adalah sikap memutlakan selain kepada Allah, termasuk sesama manusia. Karenanya tirani sebagai manifestasi pemutlakan di luar Dzat Yang Mutlak, adalah kewajiban atas seorang beriman untuk meruntuhkannya, sebagaimana telah menjadi kewajiban para rasul Allah.

Karena itu, wujud konkrit keimanan pada Allah mengharuskan pola hidup yang dibangun atas prinsip musyawarah yang merupakan

cerminan dari proses interaksi antara individu dengan hak dan kewajiban yang sama. Dengan jelas al-Qur'an menjelaskan:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan segala urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, lagi pula mereka mendermakan sebagian harta yang kami berikan pada mereka (QS. Al- Syura, 48: 38).

Prinsip syura dalam ayat di atas merupakan satu bentuk implementasi ajaran egaliter yang berorientasi pada penegakan keadilan. Egaliter sebagai satu paham kehidupan yang berdasarkan pandangan kesamaan derajat manusia, secara operasional tercermin pada prinsip syura yang dasar mekanisme kerjanya terletak pada "didengar" dan "mendengar". Dalam konteks ini Nurcholis Majid menegaskan bahwa musyawarah mengandung makna mutuality, yakni hubungan timbal balik, dalam hal ini ialah hubungan saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik. Ditegaskan dalam al-Qur'an *"dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan mereka"* (QS. al-Imran, 3: 159).

Dalam pandangan al-Qur'an manusia merupakan komunitas individu yang mempunyai persamaan atau kesatuan universal yang didasarkan atas kesatuan agama tauhid dan kesatuan awal kejadiannya. Al-Qur'an menegaskan: *"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku ada-*

lah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku" (QS. al-Mu'minun (23): 52). Juga dalam firman-nya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS. al-Nissa, 4: 1).

"Umat" dalam ayat di atas (QS. 23: 52) menunjukkan bahwa "agama", keseluruhan para nabi adalah satu, dengan dasar keyakinan akan adanya Allah SWT.

Dawam Rahardjo menginterpretasikan ayat di atas, dengan hanya bertakwa kepada Allah, maka akan terjadi persatuan dalam masyarakat menjadi satu umat. Dengan mengutip pendapat Amin Rais ia menegaskan bahwa, tauhid mengacu pada lima kesatuan; kesatuan ketuhanan, kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tujuan hidup dan tuntunan hidup.⁶

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa pengertian kesamaan derajat manusia yang di-

⁶ Lihat Majalah *Ulumul Qur'an* Vol. III, Jakarta 1992, hlm. 58-59.

maksud ialah adanya ikatan takwa pada Tuhan dengan menjaga hak dan kewajiban sesamanya.

Menyatakan kebenaran lewat musyawarah dengan mengindahkan hak dan kewajiban yang sama adalah merupakan salah satu makna keadilan yang erat hubungannya dengan ajaran persamaan. Persamaan keadilan yang dimaksud dalam kontek ini adalah persamaan yang didasarkan atas kesamaan kepemilikan hak dan mengakui keragaman perbedaan.

Dengan demikian, persamaan umat manusia sejagad atau kesatuan manusia didasarkan atas kualitas takwa pada Tuhan dengan tetap mengakui pluralitas potensi individu manusia. Dengan maksud memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara seseorang dengan orang lain. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an:

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat, 49: 13).

Jika standarisasi kesatuan umat manusia dan kesamaan derajatnya adalah sebagai suatu konsistensi ketakwaan pada Allah, maka sikap primordial kelompok, fanatis golongan dan etnik adalah suatu sikap yang bertentangan dengan

prinsip keadilan. Konsekwensi dari persamaan derajat manusia adalah sikap hidup tolong menolong dengan *amar ma'ruf nahyi munkar* sebagai mekanisme kerja untuk mencapai keutamaan hidup. Seperti ditegaskan dalam firmanNya:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Taubah, 9: 71).

Kesamaan derajat manusia yang dilandaskan atas kualitas ketakwaan, telah begitu kuatnya mengikat mereka dalam kesadaran moralitas persaudaraan secara masif dan universal. Seperti ditegaskan oleh Wahbah Zuhailly bahwa persaudaraan kemanusiaan, mewujudkan saling mengasihi manusia, perasaan cinta kebaikan, yaitu takwa kepada Allah, melaksanakan hukum-hukumnya dan menjauhi larangannya, mendukung pertumbuhan secara menyeluruh bagi kemanusiaan.

Berdasar pengertian-pengertian di atas, dapat ditegaskan bahwa di satu sisi pengertian keadilan sosial erat sekali hubungannya dengan ajaran persamaan, dan perbedaan di sisi lain. Hal yang sedemikian itu karena dalam pandangan al-Qur'an perbedaan sesama manusia adalah suatu hal yang alami, juga sekaligus mengandung banyak manfaat (QS. al-Hujurat, 49:

13). Sekalipun demikian manusia tetap tergolong ke dalam umat yang satu. Agama berfungsi untuk mengingatkan akan kesamaanya, sebagai landasan persahabatan, persaudaraan, dan tolong menolong dalam mewujudkan keadilan sosial.

Zakat adalah suatu tanggapan terhadap fenomena kemanusiaan, di satu sisi ia merupakan jawaban terhadap fenomena kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan dan penindasan, yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi, sosio-politik dan sosio-kultural yang tidak seimbang saat itu. Namun di sisi lain secara psiko-sosologis merupakan ancaman terhadap kejahatan yang bersemayam dalam jiwa manusia yang kotor sebagai sumber dari seluruh ketimpangan yang ada.

Dalam sistem ekonomi, sosial, dan kultural yang rapuh itulah turun ayat-ayat yang menyuruh manusia untuk memperhatikan gejala kemiskinan, kesengsaraan dan penindasan yang melanda manusia secara masif saat itu. Harun Nasution,⁷ menegaskan bahwa dalam keadaan itulah turun ayat-ayat yang mendorong orang berbuat baik terhadap golongan orang miskin serta yatim piatu. Maka tepatlah kalau zakat mempunyai fungsi sosial.

Maka jelas, kemiskinan, kesengsaraan dan penindasan, di samping masalah sosial, lebih jauh adalah merupakan akibat dosa dan keja-

⁷ Lihat *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 243.

hatan yang bersumber dari ketumpuan moral kemanusiaan. Kemiskinan tidak akan terhapus hanya dengan upaya pemerataan kekayaan, sementara kejahatan (kebekuan hati) masih bersemayam dalam jiwa manusia. Dalam kontek ini, Islam dengan konsep zakatnya datang untuk menerangi kebekuan hati manusia.

Islam sebagai suatu paham kehidupan yang menyandang keadilan sosial menyeluruh, menjamin tiap individu menikmati taraf hidup yang baik dan wajar. Upaya menuju ke arah cita-cita di atas, dimulai dengan keseimbangan peredaran harta di tengah kehidupan manusia. Firman Allah:

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota Mekkah adalah untuk Allah, rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. al-Hasyr, 59: 7).

Makna ayat di atas menegaskan bahwa dalam Islam harta mempunyai fungsi sosial, yang harus di makan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia untuk mempertajam moral sosial kemasyarakatan. Ayat di atas juga menyatakan, bahwa pembagian harta dimaksudkan agar harta tidak dimonopoli orang-orang kaya untuk kepentingan hawa nafsu, hingga mereka menelantarkan kaum yang lemah.

Begitu pentingnya keseimbangan sosial, hingga bila perlu negara dapat mengambil secara paksa harta-harta orang kaya yang kikir dan tidak menghiraukan kaum yang lemah. Dengan jelas al-Qur'an menegaskan:

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahu" (QS. al-Taubah (90 : 103)).

Ayat 103 surat al-Taubah di atas turun berkenaan dengan penolakan Nabi terhadap shadakah dari Abu Lubabah dan dua orang temannya yang hendak bertaubat di hadapan Nabi, karena mereka tidak mengikuti Nabi yang sedang berjihad. Untuk itu turunlah ayat di atas tadi yang menyuruh Nabi untuk menerima shadakah tersebut.

Mengenai kandungan ayat di atas, Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa zakat membersihkan dari sifat kikir, tamak, kekeringan cinta terhadap fakir-miskin dan menumbuhkan kembangkan sifat-sifat kebaikan.

Jika ayat di atas dihubungkan dengan sebab turunnya, maka perintah Tuhan pada nabi untuk menerima shadaqah Abu Lubabah yang karena kekikiran jiwa dan kecintaannya terhadap dunia dengan tidak mengikuti jihad adalah suatu hal yang lebih berharga dari sekedar harta yang diberikannya, sementara itu kemiskinan banyak disebabkan oleh penindasan yang ber-

sumber dari kekotoran jiwa dan kekeringan hati nurani manusia. Fenomena seperti ini adalah bersifat universal dan kontinu hingga saat ini.

Jika kemiskinan, kesengsaraan dan kemelaratan tidak hanya sekedar disebabkan kekurangan harta, tapi juga merupakan sebab akibat dari ketidak-jujuran, keserakahan, dan eksploitasi harta oleh segolongan orang, maka kemiskinan tidak hanya sekedar isu yang bersifat sosio material, namun juga bersifat sosial moral kemanusiaan. Al-Qur'an menegaskan:

"Dan kamu tidak (saling) mengajak makan orang-orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (QS. al-Fajr, 89: 18-20).

Sekalipun ayat di atas turun pada periode Mekkah, namun durasi relevansi ilustrasi dalam ayat di atas masih berlangsung hingga saat ini. Ayat di atas menyatakan tiga sikap ketidakpedulian terhadap kehidupan sosial: (1) sikap tidak peduli pada orang-orang miskin, (2) sikap ketidakadilan dan penyalahgunaan harta pusaka, (3) ketamakan terhadap harta benda. Ketidakpedulian sosial yang digambarkan dalam ayat tadi disebabkan oleh persepsi moral spiritual manusia yang tumpul.

Keserakahan harta, ketidakpedulian pada anak yatim, dan penyalahgunaan harta pusaka yang disebut dalam (QS. al-Fajr, 89: 18-20) itulah sumber dari penderitaan, kemiskinan, dan

kesengsaraan yang menimpa umat manusia, terutama kaum lemah. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengutamakan keseimbangan harta sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan sosial.

Dalam konteks ini Sayyid Qutb menegaskan bahwa keseimbangan sosial ini penting sekali guna menjaga ketentraman masyarakat. Dengan bahasa lain. Haekal menyatakan, menumpuk-numpuk harta dan keserakahan itulah yang telah menghilangkan rasa persaudaraan umat manusia, dan membuat mereka saling bermusuhan.

Tentang “pemerataan” atau lebih mendasar lagi soal keadilan sosial, zakat secara fungsional sebagai komponen sosial, karena berhubungan langsung dengan pemerataan akses sumber daya materi yang menjadi tema sentral pemerataan dan keadilan sosial.

Pemerataan yang dimaksud di sini, bukan dalam bentuk keharusan penyamarataan hak milik setiap orang, tapi agar tak terjadi suasana ketimpangan, di mana sebagian yang lain hampir-hampir tak memiliki fasilitas untuk hidup.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa zakat sebagai suatu penertiban sosial merupakan konsep pajak dalam Islam yang mencapai bentuk yang sesungguhnya sejak terbentuknya komunitas politik di Madinah. Zakat sebagai ibadah dwifungsi, yakni iman dan amal itu, jelas secara fungsional merupakan

komponen sosial dalam penegakan keadilan sosial.

Karena itu, dalam suatu masyarakat Islam harus selalu dilakukan saling membantu. Hidup gotong royong dalam masyarakat Islam adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan, untuk itu Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan bagaimana bentuk masyarakat Islam, dengan sabdanya:

“Hubungan orang mu'min dengan sesama, adalah bagaikan satu bangunan, antara satu sama lain saling kuat-menguatkan”

“Perumpamaan orang-orang mu'min, di dalam cinta-mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi, ialah bagaikan satu tubuh, manakala salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh anggota badannya terasa demam dan tidak bisa tidur.”

“Orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, oleh karena itu janganlah berlaku zalim kepadanya, dan jangan membiarkan ia terlan-tar.”

“Setiap penghuni suatu daerah, yang di dalamnya ada seorang di antara mereka yang menderita lapar, maka mereka semua akan terlepas dari jaminan Allah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di atas sudah cukup memberikan ajaran kepada umat Islam bahwa setiap individu muslim dengan berbagai status dan kapasitasnya dituntut untuk

tidak membiarkan ketimpangan sosial di mana ia hidup dan berada.

Dengan ajaran tersebut pula, Islam menjamin kehidupan ini sejahtera. Karena yang memiliki harta memiliki kewajiban tersendiri untuk menolong orang miskin, baik melalui penunaian zakat, infak, maupun shadaqoh. Sebaliknya, orang miskin dilarang untuk meminta-minta karena kemiskinannya, namun diharuskan untuk bekerja keras mengatasi problemanya.

Dengan begitu, setiap individu dalam pandangan Islam harus menunaikan kewajibannya. Karena itu orang yang memiliki harta, sesungguhnya ia tidak menolong orang miskin ketika ia membantu mengatasi kemiskinan itu, melainkan ia sedang melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang diberi amanat oleh Allah SWT selaku seorang kaya.

Dari situ terlihat bahwa sesungguhnya ajaran Islam menjamin kesejahteraan kehidupan ini.

Bagian Ketiga:
MEMBANGUN PEREKONOMIAN
DENGAN KONSEPSI ISLAM

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah,¹ dijelaskan ekonomi Islam adalah usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui metode atau cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, untuk mengharapkan ridha Allah SWT.

Kelebihan Islam dalam memandang ekonomi adalah Islam tidak memandang hal-hal yang bersifat material sebagai tujuan utama, akan tetapi Islam melihat materi dan pemenuhan hidup manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu mengharap ridha Allah SWT. Untuk itu Islam tidak mengajarkan penguasaan alam dalam artian penindasan atau pengrusakan terhadap alam akan tetapi Islam mengajarkan pemeliharaan alam material kemudian mengajak berdampingan mengabdikan kepada Allah pencipta maya pada.

Sebagai agama universal, Islam memandang ekonomi berdasarkan filsafatnya yang universal, dan pandangannya yang serba meliputi. Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan sosial. Islam tidak menghalangi fitrah manusia dan

¹ Buku ini ditulis oleh Habib Nazir dan M. Hasanuddin, dan diterbitkan oleh Penerbit Kaki Langit Bandung tahun 2004. Lihat hlm. 159-162.

aturan hidupnya yang asli serta tujuan-tujuan hidupnya yang luhur dan mulia.

Islam mendasarkan politik kepemilikannya atas dua prinsip yaitu:

1. Hukum. Melalui peraturan hukumnya, Islam mencapai tujuan yang pasti berupa terbentuknya masyarakat yang sehat dan bersih yang berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan.
2. Pengarahan. Dengan pengarahannya Islam mendorong kepada masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang wajar, dalam mempertinggi kebutuhan yang ideal. Islam tidak menghalangi masyarakat untuk mengejar kehidupan ideal tersebut dalam berbagai aspek kehidupannya. Islam selalu membuka pintu pertumbuhan dan perkembangan umatnya.

Islam menetapkan hal kepemilikan pribadi atas harta benda, melalui kepemilikan yang disyahkan oleh syariat, Islam juga membuat peraturan untuk melindungi hak tersebut dari pencurian, ataupun penipuan. Ketetapan-ketetapan ini bukan merupakan intervensi Islam terhadap hak milik pribadi, seperti hak dalam pembelanjaan harta, sewa-menyewa, gadai, hibah, wasiat, hadiah, dan hal-hal lainnya dalam membelanjakan harta secara sah. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan cara membelanjakan harta. (QS. 4: 32).

Di samping memberi jalan untuk usaha-usaha seperti berdagang, bertani, dan memproduksi, Islam juga mempersiapkan cara-cara har-

ta tersebut beredar, baik untuk dirinya maupun bagi orang lain. Islam membiarkan kebebasan memiliki harta secara mutlak dan tanpa pengendalian. Hal ini terletak pada waris dan wasiat. Adapun mengenai hibah atau pemberian hartanya sesuka hati untuk menilai keikhlasan si pemberi.

Apabila seseorang telah melepaskan penguasaan atas hartanya dan harta tersebut berpindah kepada ahli warisnya, atau orang lain yang menerima wasiatnya, perpindahan harta tersebut adalah menurut perhitungan yang sistematis yang telah ditetapkan bagi harta warisnya itu dan ia tinggal mematuhi perhitungan itu saja.

Sistem ekonomi Islam adalah merupakan salah satu alternatif yang mesti diperhitungkan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat mencapai keadilan. Keharmonisan, dan keselarasan hubungan antar sesama manusia.

Islam tidak mengenal kesewenang-wenangan raja atau pemerintah yang berdaulat. Harta disimpan di Baitul Mal digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saja. Seluruh harta yang di simpan di Baitul Mal bukan hanya memenuhi gudang akan tetapi harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ideologi keislaman menerapkan sistem ekonomi yang sehat dan dapat dipercaya. Pemerintah hanya mengelola saja bukan memilikinya, jangan hal-hal yang sifatnya besar menurut perhi-

tungan ekonomi, hal-hal yang dianggap kecil pun harus meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat.

Karena kunci filsafat dalam ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Allah SWT, alam semesta dan orang-orangnya serta tujuan hidupnya di muka bumi.

Alam semesta merupakan amanat atau titipan Allah SWT kepada manusia sebagai khali-fah di muka bumi ini, maka manusia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dan keberhasilan dalam kehidupan ukhrawi tergantung amaliahnya pada kehidupan di muka bumi.

Di lain pihak, Islam mewajibkan kaum muslimin untuk mengamati kehidupan sekitarnya dan memilih yang terbaik dan apa yang ditawarkan oleh kehidupan. Sistem ekonomi Islam berakar kuat pada empat hipotesis yaitu:

1. Kegiatan ekonomi berhubungan erat, lewat kesatuan dengan lingkungan etika manusia.
2. Berdasarkan kualitas dasar keseimbangan, dalam pengertian yang telah dijelaskan di atas, harus diperoleh suatu keseimbangan yang adil di antara dasar-dasar produksi, konsumnsi, dan seluruh distribusi.
3. Kehendak bebas yang dijabarkan ke dalam bidang ekonomi membutuhkan perpaduan yang sesuai dengan kebebasan ekonomi individu dan intervensi negara, agar mencerminkan

kan ekonomi khas Islam mengenai kebebasan manusia.

4. Pertanggungjawaban menuntut dibuatnya kebijaksanaan distribusi dan pengalihan sumber-sumber penghasilan di antara berbagai kelompok dan golongan masyarakat. Ini juga berhubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang benar-benar mengetahui sifat yang penting dan penuh risiko.

A. Sendi-sendi Ekonomi Islam²

Usaha untuk membicarakan "sistem ekonomi Islam" tidak bisa lepas dari "sistem politik Islam". Ini karena prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menyediakan satu kerangka kerja seperti yang bisa ditemui dalam sistem politik. Tugasnya untuk mengikuti undang-undang dan mengkaji keadaan penghidupan ekonomi yang sebenarnya, dalam konteks masyarakat Islam, dengan suatu cara hidup Islam yang dapat dilaksanakan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Tauhid adalah pengakuan atas keesaan

² Tulisan ini diangkat dari pemikiran Prijono Tjiptoharjanto, dalam: *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1988, 12-17.

Allah. "Tidak ada Tuhan selain Allah SWT." Pengakuan ini berarti pula pengakuan bahwa segala yang ada di bumi ini adalah milik Allah semata-mata. Manusia hanya sebagai pelaksana, orang yang diserahi untuk mengelola dan menggunakan milik Allah tersebut. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an: "...kepunyaan Allah apa pun yang di langit dan di bumi" (QS. 3: 129), dan juga lebih dijelaskan bahwa manusia bukanlah majikan mutlak dan hartanya: "*Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi*" (QS 2: 284).

Mengingat hal tersebut, ekonomi Islam berdasarkan atas beberapa sendi yang perlu dipahami dan diresapkan secara mendalam. Sendi-sendi tersebut menyangkut:³

- a. Keyakinan bahwa alam semesta adalah milik Allah, dan bahwa harta kekayaan adalah juga merupakan harta Allah.
- b. Keikhlasan bahwa manusia hanyalah mendapat kepercayaan, mengatur apa yang ada pada tangannya yang dipercayakan Allah kepadanya.
- c. Kesadaran bahwa kepemilikan atas sesuatu dibenarkan dalam Islam sepanjang masih menurut kerangka keadilan dalam pendapatan dan pengeluaran, yang sesuai dengan kewajiban untuk mengutamakan kesejahteraan umat.

³ Rekomendasi Komisi Konsep dan Metodologi Ekonomi Islam dalam *Konferensi Internasional Ekonomi Islam Pertama di Makkah*, Saudi Arabia, 21-26 Februari 1976.

Oleh karenanya bagi manusia, khususnya yang bertakwa, hak yang dipunyainya hanyalah hak untuk menggunakan segala sesuatu yang dimiliki mutlak oleh Allah. Hak penggunaan ini bersifat relatif, artinya manusia hanyalah berhak mengelola dan menguasai penggunaannya saja. Milik relatif ini hanya terbatas pada apa yang telah diusahakannya. Karena, pada dasarnya, setiap pria maupun wanita mendapat bagian dari hasil usahanya sebagai haknya. Sedangkan penguasaannya, sebagian dipergunakan untuk umum, karena Allah telah memerintahkan agar memberikan kepada orang lain harta Allah yang telah diberikan kepadanya.

Untuk mengelola dan menggunakan milik Allah secara tepat dan sesuai dengan perintah-Nya, Allah menjadikan manusia khalifah atau penguasa di bumi. Allah juga meninggikan sebagian di antara mereka atas sebagian lainnya beberapa derajat, karena Allah hendak menguji manusia tentang apa yang diberikan kepadanya. Allah selalu melihat bagaimana perbuatannya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.

Sebagai *khalifatullah*, manusia dalam kehidupan di dunia ini dihiasi dengan harta dan anak yang merupakan kebanggaan serta kemegahan. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia merupakan kenikmatan dan perhiasan hidup. Akan tetapi, kesenangan atas kehidupan dunia ini adalah, sekali lagi, kesenangan yang menipu dan memperdayakan. Oleh karenanya, manusia harus berpandai-pandai

dalam mengatur dan mengelola nikmat Allah tersebut. Hendaknya manusia sadar bahwa titipan Allah tersebut dapat saja diambil-Nya kembali atau pun dipindahkan kepada orang lain yang lebih diridhai-Nya.

Kalau tauhid mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah, maka hendaknya nikmat yang diterimanya itu pun bisa dibagi dengan teman-teman dan orang lain yang memerlukan. Di sini peran rasa persaudaraan yang ditumbuhkan dalam masyarakat Islam muncul dengan jelas.

Prinsip persaudaraan sebenarnya merupakan bagian dari konsep tauhid. Disebut demikian karena persaudaraan pada dasarnya merupakan pelaksanaan tauhid itu sendiri, yaitu: persamaan dan kerjasama yang didasari pada asas saling menghormati.⁴

Islam mengharamkan sesuatu yang dapat memusnahkan prinsip persaudaraan ini. Bahkan Islam melarang semua bentuk bunga, judi, dan spekulasi, yang kesemuanya dapat menghancurkan persaudaraan. Selain itu, prinsip persamaan akan membedakan kebebasan pada setiap individu untuk memilih, merancang dan menentukan masa depannya sendiri. Sedangkan prinsip kerjasama akan mengarah pada kesederhanaan, kedamaian yang akan menumbuhkan keamanan di antara anggota masyarakat.

⁴ Ziauddin Sardar, *Sains, Teknologi dan Pembangunan di Dunia Islam* (Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1981).

kat dalam perekonomian tersebut.

Sendi-sendi ini yang harus ditegakkan di dalam menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian dari pandangan hidup kaum Muslimin.

Dengan demikian, sebenarnya dapat dikatakan bahwa tujuan dari sistem perekonomian menurut Islam mengarah kepada kesejahteraan masyarakat secara luas. Idam-idaman suatu "*welfare state*" merupakan harapan dari setiap anggota masyarakat. Di dalam Islam, konsep kesejahteraan ini telah dipelopori oleh Nabi Muhammad Saw dalam mengembangkan misi beliau untuk mengharap anugerah (rahmat) Allah bagi seluruh masyarakat, dengan mengerjakan hal-hal yang diridhai-Nya.

Menuju Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan dari setiap negara tentunya mengejar tumbuhnya kesejahteraan dalam masyarakat. Sudah barang tentu pengertian kesejahteraan itu akan berbeda menurut sistem perekonomian yang dianut oleh negara-negara tersebut. Namun demikian, konsep mengenai kesejahteraan itu sendiri bersifat universal.

Konsep kesejahteraan selalu dihubungkan dengan penanggulangan kesulitan, menumbuhkan kemakmuran, membentuk iklim yang penuh dengan cinta kasih dan perhatian, menjamin tidak akan terdapat korupsi, kelaparan, ke-

takutan dan gangguan mental.⁵ Jadi merupakan tugas pemimpin atau kelompok yang memerintah umat untuk menumbuhkan keadaan-keadaan di atas, bila kesejahteraan yang merupakan tujuan akhir "sistem ekonomi Islam".

Keinginan untuk menumbuhkan kesejahteraan ini sejalan dengan Syariat yang menggunakan terbinanya: (a) realitas sepenuhnya atas nilai-nilai Islam di dalam setiap individu Muslim maupun di dalam masyarakat secara keseluruhan, dan (b) kecukupan seluruh kebutuhan dasar bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat.

Dengan tujuan di atas, menjadi sulit untuk membedakan apakah ekonomi Islam itu sebenarnya bersifat positif atau negatif.⁶ Beberapa kendala yang mengaburkan antara apa yang diinginkan dan praktek kenyataan sehari-hari, menyebabkan sulit untuk membedakan aspek positif dan aspek normatif dari suatu sistem perekonomian yang bernafaskan Islam. Meskipun demikian banyak ekonom yang cenderung mengatakan bahwa "sistem ekonomi Islam" lebih bersifat normatif dilihat dari tujuan yang ingin dicapai dan prinsip-prinsip yang diletakkannya. Berbagai usaha dapat dijalankan untuk menumbuhkan kesejahteraan ini. Salah satu di antaranya adalah dengan melalui lembaga zakat.

⁵ M. Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy* (Lancaster The Islamic Foundation, 1979).

⁶ Untuk pengetahuan lebih lanjut; dapat dilihat: M.A. Mannan, "Islamic Economics as a Social Science" dalam *Journal of Research in Islamic Economics*, vol. 1, Summer 1983, hal. 49-61,

Dari segi ekonomi, zakat memegang peranan penting dalam hubungannya dengan pembagian pendapatan dalam masyarakat yang mengarah pada keadilan sosial, yang memang ditumbuhkan dalam masyarakat Islam. Sebagai salah satu alat untuk pemerataan pendapatan, yang diberikan sebagai zakat—dan juga sedekah adalah sebagian dari rizki dan merupakan harta yang dicintainya.

Dengan mengeluarkan zakat dan sedekah ini, Allah menjamin wajib zakat tersebut tidak akan menjadi miskin. Karena pada dasarnya hanya Allah lah pemberi rizki yang sesungguhnya.

Sebagai salah satu usaha untuk meratakan pendapatan, zakat merupakan penerapan dari "hukum manfaat yang berkurang (*law of the deminishing returns*)" yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Artinya, manfaat dan kekayaan yang dimiliki tidak berkurang, karena pemilikan kekayaan tersebut tidak berlebih-lebihan akibat sebagian telah dikeluarkan dalam bentuk zakat. Pemilikan kekayaan yang berlebihan itu dapat mengurangi "manfaat" dan arti kekayaan itu sendiri bagi pemiliknya. Karenanya Islam tidak menyetujui sesuatu yang berlebihan: "*Yang mengumpulkan kekayaan (di dunia ini) dan menumpuk-numpukkan, dia mengira bahwa, kekayaan itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam api yang menganga*" (QS.104: 24). Sementara di pihak yang miskin, manfaat zakat yang mereka terima sungguh besar, karena telah memberikan kepada golongan ini kenikmat-

an dan cahaya hidup yang pada awalnya telah mulai meredup.

Di samping sebagai alat untuk meratakan pendapatan, zakat juga merupakan sarana untuk mencari pendanaan program jaminan sosial. Oleh karenanya, diatur agar hasil pungutan zakat dapat digunakan untuk menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang lazimnya tidak dapat terjangkau melalui alat kebijaksanaan fiskal biasa. Pendanaan program jaminan sosial ini penting, sebagaimana diingatkan dalam al-Qur'an, "*supaya kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu*" (QS. 59: 7).

Zakat sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan dan juga cara pengumpulan dana jaminan sosial yang bersifat tauhid Islami, sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu. Telah diperingatkan kepada semua manusia untuk mengelola milik Allah: "*... dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang telah Allah wakilkkan kepadamu untuk menguasainya*" (QS.57: 7). Oleh karenanya, dengan mengeluarkan zakat diharapkan tumbuh manusia-manusia yang berjiwa tenang, yang kembali kepada Allah dengan hati puas dan lagi diridhai-Nya, serta termasuk dalam kelompok hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga-Nya.

B. Prinsip-prinsip Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam kegiatan perekonomian, manusia telah mengalami beberapa tahapan, yang dari setiap tahapan menghasilkan praktik dan konsepsi tersendiri. Kemudian, praktik dan konsep tersebut menjadi norma-norma ekonomi yang mungkin masih hidup di masa sekarang ini.

Tahap pertama adalah ketika manusia masih hidup di gua dan memperoleh makanan dari berburu serta memetik buah-buahan dan tanaman yang ada di hutan. Karena untuk berburu diperlukan alat yang sulit dibuat (kapak batu, misalnya), maka mereka yang menguasainya akan memiliki kekuatan atau pengaruh sosial lebih tinggi di masyarakatnya. Pada tahap ini dikenal praktik tukar-menukar (*barter*).

Tahap kedua, yakni ketika manusia mulai belajar dari alam, sehingga tidak lagi hidup di gua dan mulai mengenal praktik cocok-tanam. Manusia sudah tidak terlalu menggantungkan ketersediaan pangannya pada kelimpahan alam, tetapi sudah pada upaya bercocoktanam untuk menghasilkan pangan lebih banyak dan lebih cepat. Peralatan logam mulai dikenal, sehingga piranti pertanian dapat dibuat lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak. Muncul kemudian kesenjangan antarwilayah, dan *barter* dilakukan dalam kawasan yang lebih luas. Pada tahap ini dikenal perdagangan dan pasar.

Tahap ketiga adalah munculnya alat tukar karena membawa barang dalam jumlah banyak

dianggap tidak praktis, sehingga perlu dicari alat tukar sebagai patokan nilai bagi barang yang dipertukarkan. Kita kenal alat tukar dalam bentuk tembikar/keramik, emas, dan perak. Puncak dari alat tukar adalah matauang, yang kemudian berkembang dengan munculnya lembaga perbankan dengan berbagai perangkat yang mengatur transaksi, seperti cek, giro, dan lain-lain.

Tahap keempat adalah munculnya industri, yang mana produksi dalam jumlah besar (massal) dengan mutu yang baik dan seragam, serta harga murah. Pendorong proses industri adalah ditemukannya teknologi mesin uap, dan industrialisasi melahirkan konsep ekonomi dan manajemen ilmiah. Berbagai peristiwa perekonomian lebih dapat diprakirakan, dan risiko dapat diperkecil. Untuk mengendalikan risiko akhirnya dikembangkan lembaga asuransi. Instrumen perekonomian juga semakin bertambah, misalnya saham dan berbagai bentuk surat berharga lainnya.

Tahap kelima, manusia memahami dan mengenal peristiwa alam yang berkaitan dengan pengendalian dan akhirnya lahir sistem kontrol yang melahirkan teknologi komputer. Selain itu, manusia juga mengembangkan teknologi telekomunikasi.

Dewasa ini, ketiga jenis teknologi tersebut (komputer, kontrol, dan komunikasi) telah berkembang menjadi satu sinergi, sehingga kemajuan di satu aspek akan mendorong munculnya kemungkinan pemanfaatan baru dari aspek lain-

nya, dan akhirnya akan melahirkan teknologi lebih baru. Kegiatan ini mengitari ekonomi disemarakkan oleh munculnya "alat bayar" dan produk digital, seperti kartu kredit, ATM, serta lembaga, dan mekanisme digital seperti bank digital dan modal transfer digital. Produk digital yang paling banyak dikenal adalah software yang telah melambungkan orang kaya baru, seperti Steve Jobs, Bill Gates, dan Dell. Diperkirakan nilai kekayaan mereka mengalami kenaikan sebesar 10 juta \$ setiap harinya, Karena produk digital tidak "memakan ruang" dan mudah dikirimkan ke mana saja, maka produk digital memiliki karakteristik ekonomi berbeda, yang tentu tidak sama dengan produk non-digital. Oleh karenanya, kaidah ekonomi non-digital tidak dapat diterapkan begitu saja.

Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi selalu dikaitkan dengan prinsip hidup setiap individu muslim, baik itu menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Salah satu ajaran misalnya, mengaitkan perilaku ekonomi itu dengan ajaran tentang pertanggungjawaban di hari akhirat nanti. Karena itu aktifitas ekonomi Islam dilandasi oleh empat prinsip pokok:

I. Prinsip Tauhid

Prinsip ini mengantarkan perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang dimilikinya adalah milik Allah yang diperintahkan oleh pemiliknya agar sebagiannya diberikan kepada yang membutuhkan-nya (QS.24: 33). Islam memandang harta kekayaan dan segala sesuatu adalah milik Allah. Ha-

sil-hasil produksi yang dapat menghasilkan uang atau harta kekayaan adalah hasil rekayasa manusia yang bersumber dari bahan baku ciptaan Allah. Di sisi lain bahwa keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi adanya interaksi dan partisipasi orang lain atau masyarakat. Seperti para pedagang membutuhkan pembeli, supaya barang dagangannya terjual. Para pengusaha membutuhkan stabilitas keamanan supaya lancar perusahaannya.

Nilai tauhid yang melahirkan kesatuan dunia dan akhirat mengantar para ekonom untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi keuntungan yang lebih kekal dan abadi. Prinsip tauhid yang menghasilkan pandangan tentang kesatuan umat manusia akan membimbing pengusaha untuk menghindari bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia, sehingga aktifitas ekonominya selalu berorientasi pada kemakmuran bersama. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Taubah: 34, 103, dan al-Qashas: 77.

Dalam ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa pengusaha muslim yang mempunyai kelebihan usahanya diharuskan mengeluarkan sadaqah/derma atau mengeluarkan sebahagian kecil usahanya untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan dalam mengembangkan usahanya. Dalam surat al-Taubah ayat 34 ditegaskan, bagi yang mempersulit proses dan perkembangan perekonomi-

an, seperti melakukan monopoli barang untuk mencari keuntungan sendiri, manipulasi, penimbunan, maka yang berbuat seperti itu akan memperoleh azab yang berat, salah satunya kehancuran dalam ekonominya. Oleh karena itu, setiap individu atau kelompok disuruh berusaha mencari rizki dalam berbagai aktifitas ekonomi untuk kemakmuran bersama dan tidak menimbulkan bencana bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (QS. Qashash: 77).

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menghindarkan adanya monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu. Nilai ekonomi Islam tidak melegitimasi perputaran proses ekonomi yang sempit yang menyebabkan kapital ada atau dimiliki oleh individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu (QS.59: 7). Prinsip ini juga tidak membenarkan dalam proses perekonomian terjadi penimbunan dan pemborongan barang yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad:

"Siapa yang menimbun barang selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah terlepas dari diri Allah, dan Allah juga terlepas dari dirinya". (H. Riwayat Abu Dawud).

Surat al-Hasyr ayat 7 dan sabda Nabi tersebut di atas, bisa dijadikan dasar pemberian wewenang kepada pemerintah atau penguasa untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelun-

dupan, dan yang mengambil untung secara berlebihan. Dalam rangka menjaga keseimbangan, Islam menugaskan pemerintah untuk mengontrol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin agar paling tidak bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, Nabi bersabda "*masyarakat berserikat dalam tiga hal, air, rumput, dan api*". (H.R. Abu Daud). Tiga komoditi ini merupakan kebutuhan masyarakat pada masa Nabi SAW dan tentunya setiap masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan lain, yang masing-masing dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhannya.

3. Kehendak Bebas

Prinsip ini mengarahkan kepada manusia suatu kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang di hadapan, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Manusia yang baik di sisi Allah, adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu untuk penerapan tauhid dan keseimbangan. Dari sini, lahir prinsip tanggung-jawab baik secara individu atau secara kolektif (dalam Islam disebut *fardlu 'ayn* dan *kifayah*). Dengan ajaran ini berarti dalam aktifitas ekonomi dan ekonom ada kewajiban individu dan ada kewajiban bersama dan keduanya harus dilakukan secara seimbang.⁷

⁷ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan. 1996, hlm. 409.

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip ini mengandung arti bahwa semua aktifitas manusia termasuk aktifitas ekonominya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Hal ini dilakukan supaya keadilan dapat tegak, baik secara individu atau kelompok. Islam tidak melarang ekonom untuk meraih keberhasilan dalam usahanya/aktifitas ekonominya, tetapi aktifitas itu harus selalu terkait dengan nilai-nilai moral. M.N. Siddiqi⁸ menjelaskan bahwa "keberhasilan terletak dalam kebaikan. Dengan perilaku manusia yang semakin sesuai dengan pembakuan-pembakuan moral dan semakin tinggi kebbaikannya, maka dia semakin berhasil selama hidupnya, pada setiap fase keberadaan, setiap langkah, individu muslim berusaha berbuat selaras dengan nilai-nilai moral". Kebaikan, dalam peristilahan Islam, berarti sikap positif terhadap kehidupan orang lain. Prinsip melakukan kegiatan ekonomi yang dilandasi oleh moral, akan memudahkan bagi ekonom untuk menegakkan keadilan dan mempertanggungjawabkan aktifitasnya.

Dengan adanya prinsip pertanggungjawaban di akhirat kelak ini, maka prinsip ekonomi Islam berbeda dengan prinsip lainnya. Donny Irawan,⁹ Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) – Batam, menulis bahwa dilihat dari sisi pandangan ekonomi, jelas terdapat per-

⁸ Lihat dalm buku, *Some Aspects of the Islamic Economy*. Delhi: Markazi Maktaba Islam, 1972, hlm. 15-16.

⁹ Lihat dalam http://batampos.co.id/index.php?Option=com_content&task=view&id=762&I...,

bedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis dalam memandang ekonomi; dalam menetapkan apa yang menjadi permasalahan ekonomi yang sebenarnya; dan dalam menentukan berbagai langkah dan strategi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Dalam Ekonomi Islam terdapat gambaran real dan praktis kehidupan ekonomi yang meliputi kegiatan ekonomi di berbagai pasar komoditi yang mencakup kegiatan produksi, investasi, perdagangan, konsumsi, dan distribusi; pasar input yang mencakup sektor jasa (tenaga kerja), politik pertanahan; sektor kegiatan keuangan dan perbankan; perdagangan luar negeri; hingga pendapatan dan belanja negara. Jadi, dari sini saja dapat terlihat betapa permasalahan ekonomi dipandang sebagai suatu permasalahan 'integral' satu dengan yang lainnya, yang juga solusinya harus integral, tidak sekedar solusi parsial.

Dalam banyak literatur modern, istilah ilmu ekonomi secara umum dipahami sebagai suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang-perorang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan harus dilakukan manusia pada saat akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena setiap manusia mempunyai keterbatasan (kelangkaan) dalam sumberdaya yang dimilikinya. Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi, investasi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat. Intinya, pembahasan ilmu ekonomi ditujukan untuk memahami bagaimana masyara-

kat mengalokasikan keterbatasan (kelangkaan) sumberdaya yang dimilikinya.

Ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan: alokasi sumberdaya yang langka dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa; cara-cara memperoleh barang dan jasa; kegiatan konsumsi, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup; kegiatan investasi, yakni kegiatan pengembangan kepemilikan kekayaan yang dimiliki; serta kegiatan distribusi, yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seluruh kegiatan ekonomi -- mulai dari produksi, konsumsi, investasi, serta distribusi barang dan jasa tersebut -- dibahas dalam ilmu ekonomi yang sering dipaparkan dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis.

Pandangan sistem ekonomi kapitalis di atas --yang memasukkan seluruh kegiatan ekonomi; mulai dari produksi, konsumsi, investasi, hingga distribusi dalam pembahasan ilmu ekonomi --berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda:

"Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak (di hadapan Allah) hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan; tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan; tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia perguna-

kan; dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan". [HR. At-Tirmidzi dari Abu Barzah].

Hadis di atas memberikan gambaran bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas empat perkara: umur, ilmu, harta, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu, dan tubuhnya, setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan. Tentang harta, setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana harta diperoleh dan untuk apa harta dipergunakan. Dengan demikian, Islam mengatur dan memberi perhatian yang besar terhadap aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta. Dengan kata lain, Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang ekonomi.

Akan tetapi, pengaturan Islam dalam bidang ekonomi tidak mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks pengadaan serta produksi barang dan jasa, Islam tidak mengaturnya; bahkan menyerahkannya kepada manusia. Islam hanya mengatur kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan tatacara perolehan harta (konsep kepemilikan); tatacara pengelolaan harta, mulai dari pemanfaatan (konsumsi) hingga pengembangan kepemilikan harta (investasi); serta tatacara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat. Pembahasan tentang pengadaan dan produksi barang dan jasa dipandang sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Sementara itu, pembahasan tentang tatacara perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian harta di pandang sebagai bagian dari sistem ekonomi. Atas dasar

ini, Islam memberikan pandangan yang berbeda terhadap ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.

Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan, yakni menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi setiap individu rakyat-Muslim dan non-Muslim yang hidup dalam naungan Sistem Ekonomi Islam. Hal ini karena semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan penerapan politik-ekonomi Islam, yakni menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan pemenuhan berbagai kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. Politik-ekonomi seperti ini pada akhirnya akan menciptakan kehidupan ekonomi yang sejahtera, penuh ketenangan dan kesederhanaan, namun tetap produktif dan inovatif.

Kondisi ini berbeda dengan kehidupan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Meskipun penerapan sistem ekonomi kapitalis berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi, namun secara bersamaan, telah melahirkan gejala, pertentangan antarkelas yakni pemilik modal (kapitalis) dan kelompok pekerja. Akibatnya, akan kita temukan berbagai dampak nyata dalam kehidupan ekonomi kapitalis; mulai dari ketimpangan sosial yang parah, munculnya ketegangan, pertentangan, pemogokan buruh dan keresahan di antara kelompok masyarakat; berkembangnya kehidupan materialistik yang penuh dengan keserakahan yang didorong oleh semangat mencintai harta dan asyik dengan kekayaan.

an; hingga terjadinya proses dehumanisasi karena manusia tidak ubahnya seperti binatang yang hanya berupaya memperebutkan materi semata.

C. Praktik dan Tujuan Ekonomi Islam

Ahmad Muflih Saefuddin,¹⁰ Guru Besar IPB, menulis bahwa aspek hidup ekonomi masyarakat tidak terlepas dari aspek hidup yang lain. Dengan demikian, usaha memperbaiki kehidupan ekonomi, selain mempertimbangkan faktor ekonomi juga tidak kalah pentingnya faktor-faktor non-ekonomi.

Usaha perbaikan ekonomi dalam masyarakat liberal lebih ditujukan untuk memperbaiki proses kegiatan ekonomi itu sendiri, yaitu siklus produksi-distribusi-konsumsi, yang terutama ditekankan pada aspek teknis ekonomis. Sebaliknya, pada sistem ekonomi sosialis perbaikan lebih diarahkan kepada masyarakat di mana kegiatan ekonomi berlangsung, namun masyarakat dilihat sebagai kesatuan kolektif komunitas, sehingga harkat manusia sebagai individu kerap kali dilupakan bahkan dikorbankan. Dua pendekatan pengembangan tersebut menghasilkan pola perkembangan yang berbeda. Ekonomi liberal atau kapitalistik, yang berorientasi pada komponen modal mampu menghasilkan per-

¹⁰ Lihat dalam makalahnya, "Aktualisasi Da'wah Islam dalam Konstelasi Politik Islam", pada *Seminar Ormas Islam & Tantangan Perubahan Politik di Indonesia Menjelang Abd XXI*, Bandung, 14 Januari 1996.

kembangan ekonomi yang relatif cepat tetapi disertai ketidakadilan ekonomi. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis relatif mampu melahirkan aspek keadilan ekonomi, tetapi perkembangannya lebih lambat.

Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya sama, yaitu: (a) mewujudkan perkembangan ekonomi; (b) keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya yakni produksi, distribusi dan konsumsi; dan (c) yang sebenarnya merupakan tujuan antara atau pendukung bagi tercapainya dua tujuan tersebut ialah stabilitas ekonomi, baik stabilitas kesempatan kerja, stabilitas harga, maupun keamanan ekonomi, termasuk jaminan hidup warga masyarakat di hari tua.

Tujuan-tujuan ekonomi ini dalam praktiknya sukar dicapai secara bersamaan. Hingga saat ini belum ada konsep teoretik yang mantap untuk dapat mengembangkan ekonomi masyarakat yang secara berimbang mencapai tingkat pertumbuhan yang cepat dan tinggi sekaligus tingkat keadilan ekonomi.

Dari sisi lain, kemerosotan ekonomi suatu masyarakat baik berupa tingkat inflasi yang tinggi, rusaknya sektor produksi pertanian akibat bencana alam, ataupun sebab lain, biasanya yang paling dahulu merasakan akibatnya yang paling parah adalah masyarakat lapis bawah, yang miskin dan lemah. Hal ini terjadi baik di negara kapitalis maupun sosialis. Di negara kapitalis karena modal begitu dominan posisinya, maka kelompok yang tidak bermodal tidak

mampu melakukan kegiatan ekonominya secara bebas. Pada negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoriter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan sekedar objek bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Islam yang mendasarkan pada prinsip persamaan kedudukan, prinsip keadilan, tuntutan sosial yang secara jelas, prinsip perimbangan antara hak dan kewajiban, serta tuntunan hidup tolong menolong, memungkinkan dikurangnya penderitaan kaum lemah dalam menghadapi goncangan ekonomi. Dengan mengembangkan sikap kebersamaan dalam menikmati keuntungan dan menanggung kerugian (*profit & loss sharing* atau *al-qiradh*) pada berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam fungsinya sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsumen, maka keserasian hubungan antara unit-unit ekonomi dalam masyarakat dapat dijamin.

Sistem ekonomi kapitalistik lebih berpijak pada pemilik modal (pengusaha), sementara sistem ekonomi sosialis lebih berpihak pada buruh, sedangkan sistem ekonomi yang islami mempunyai potensi untuk menyeimbangkan pemihakan tersebut bukan saja pada pengusaha dan buruh, tetapi terutama juga pada konsumen. Secara filosofis teoretik sistem ekonomi Islam cukup meyakinkan kebenarannya, namun secara operasional empirik perlu pengembangan lebih lanjut.

Kondisi perekonomian setelah periode menikmati manisnya minyak bumi mendekati

penghujungnya, terasa mulai menghadapi permasalahan ekonomi yang cukup serius mengingat sumber utama devisa tersebut makin menyusut. Upaya mendapatkan devisa non-minyak perlu ditingkatkan. Sementara itu, kegiatan perekonomian di dalam negeri makin terasa lesu, akibat pengaruh resesi dunia maupun faktor-faktor internal sendiri. Kecenderungan ini mengakibatkan sebagian pengamat berpandangan pesimistik terhadap perkembangan ekonomi masa depan.

Walaupun faktor-faktor penyebab lambannya perkembangan ekonomi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain, tetapi kesamaan umum tetap ada yaitu bahwa didalamnya terkait variabel-variabel ekonomis maupun non-ekonomis. Kedua variabel pokok ini harus dilihat melalui pendekatan statis maupun dinamis, sehingga melahirkan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu. Setidak-tidaknya ada lima permasalahan pokok yang dihadapi perekonomian, yaitu: kurangnya modal, ledakan tenaga kerja, keadilan ekonomi yang pincang, etos kerja, dan kejujuran pelaku kegiatan ekonomi memprihatinkan. Dua permasalahan yang terakhir termasuk faktor non-ekonomis.

Masalah permodalan.

Masalah permodalan ini menyangkut keterbatasan sumber modal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain itu, daya serap investasi juga terbatas sebagai akibat dari sempitnya pasaran hasil produksi, baik untuk ekspor maupun untuk pasaran dalam negeri. Perma-

salahan ini akan diperberat dengan efisiensi pemanfaatan modal yang rendah dan arah investasi yang kerap kali tidak disertai perencanaan yang matang. Akibatnya, matarantai pengaruh ke muka dan ke belakang (*backward and forward linkage*) terbatas dan kecil.

Masalah ketenagaan.

Melihat fenomena ketenagakerjaan seolah terdapat semacam paradoks, yakni di satu pihak pengangguran makin membengkak tetapi di pihak lain dirasakan kurangnya tenaga kerja tertentu, terutama tenaga ahli dan menengah. Hal ini terjadi karena jumlah tenaga kerja kasar dan tidak terlatih (non-profesional) amat banyak, sebaliknya tenaga ahli dan terlatih amat terbatas, kecuali untuk bidang tertentu. Kerawanan tenaga kerja ini makin diperberat oleh dua hal yaitu: (1) meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi dengan teknologi tinggi (yang sebenarnya dapat dicapai dengan teknologi yang sederhana), dan (2) sikap pekerjaan yang statis, etos kerja rendah, dan langkanya motivasi wiraswasta.

Masalah keadilan ekonomi.

Sekalipun peranan sektor negara dalam bidang ekonomi cukup dominan, tetapi kebebasan bersaing sektor swasta makin tajam. Di satu pihak, perkembangan ekonomi dapat dipercepat karena pihak swasta domestik maupun asing yang bermodal kuat mampu mendirikan berbagai jenis produksi dalam skala besar, teknologi canggih, efisiensi tinggi, kualitas produksi me-

ningkat dan keuntungan yang diperoleh besar. Di phak lain, sektor-sektor ekonomi yang menyangkut rakyat banyak makin lemah, terutama sektor informal. Kerajinan rumah tangga di desa, industri kecil di kota, transportasi non-mesin sebagian besar bangkrut. Fenomena yang ironi ini terlihat, yang besar makin kuat sementara yang kecil makin lumpuh dan mati.

Keterbatasan lapangan kerja di pedesaan mengakibatkan meningkatnya secara besar-besaran urbanisasi, yang berakibat menambah pengangguran di kota dan timbulnya dampak sosial yang negatif. Upaya pemerintah meningkatkan keadilan ekonomi dengan mencanangkan delapan jalur pemerataan, rupanya belum juga mencapai sasaran. Strategi pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada pertimbangan ekonomi, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan, walaupun telah diakui banyak segi kelemahannya, masih tetap dilaksanakan. Sementara isu keadilan sosial atau emansipasi sosial sebagai strategi alternatif, walaupun telah mendapat pasaran di forum kajian teoretik di berbagai forum akademik rupanya belum mendapat pasaran dalam praktik.

Dengan menyusutnya secara tajam sumber modal yang dikuasai negara khususnya dari hasil minyak dan gas bumi sejak tahun 1982, peranan swasta bermodal besar makin dominan, situasi liberal yang kapitalistik makin mendapat angin, sehingga kegiatan ekonomi lemah, termasuk koperasi, makin memburuk. Sinyalemen sistem ekonomi umat lebih condong ke ekonomi

kapitalistik makin mendapat pembuktian empirik yang valid dengan fenomena-fenomena ekonomi di atas.

Problem ekonomi yang kompleks tersebut, yang memprihatinkan masyarakat terutama golongan menengah dan bawah, sebenarnya hampir identik dengan problematika ekonomi umat Islam, karena di samping merupakan bagian mayoritas rakyat juga karena hampir semuanya menduduki strata sosial-ekonomi *menengah-bawah* dan *bawah*. Sektor ekonomi informal terutama dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, pada sektor ekonomi *kuat* dan *menengah-kuat* justru umat Islam merupakan minoritas dan tidak berperan menentukan. Pihak yang paling berperan justru pengusaha non pribumi WNI dan WNA yang menguasai matarantai ekonomi yang tidak terputuskan sejak dari impor sampai ke pedesaan, dan dari pedesaan sampai ke ekspor.

Di sisi lain, sektor negara memegang peranan yang cukup besar dalam perekonomian, baik sebagai konsumen berbagai hasil produksi maupun sebagai produsen barang-barang penting bagi kebutuhan rakyat. Dalam kaitan ini, pemborong yang mensuplai kebutuhan negara maupun penyalur hasil produksi negara hampir seluruhnya dinikmati oleh pengusaha menengah-kuat dan kuat, terutama yang memiliki hubungan yang akrab dengan pejabat yang berwenang. Walaupun hal itu, bukan hal yang baru, karena sudah terlihat sejak tahun 50-an, namun ada perbedaan, yaitu pada masa itu pengusaha muslim dapat ikut menikmatinya, misal-

nya di bidang tekstil, koperasi penyalur barang produksi negara dan sebagainya.

Dalam jangka panjang perlu dikembangkan secara lebih serius dan sistematis sistem ekonomi yang bersumber pada ajaran Islam, yang secara filosofis-teoretik telah terbukti besar kemungkinannya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi. Konsep-konsep yang masih bertaraf filosofis perlu dioperasionalkan lebih lanjut, dengan mengupayakan kesepakatan ijtihadi tentang beberapa nilai instrumental ekonomi, seperti konsep tentang: perbankan, asuransi, zakat, keadilan sosial, dan sebagainya. Pengembangan konsep-konsep tersebut akan menjadi bermakna ibadah, terutama sebagai konsep kontributif bagi pengembangan konsep Sistem Ekonomi Nasional.

Untuk itu maka perlu dikembangkan strategi da'wah bil hal ekonomi sebagai berikut:

1. Meninjau kembali model dan prioritas pembangunan ekonomi yang semula mendahulukan segi-segi ekonomis-teknis ke arah ke-serasian segi-segi pembangunan manusia di bidang material dan mental-spiritual, agar perbaikan kemakmuran tidak justru mengarah pada pendangkalan nilai-nilai agama.
2. Menghilangkan secara bertahap penyebab kemiskinan di kalangan umat, melalui usaha menghilangkan budaya kemiskinan, perbaikan kecakapan dan pengetahuan agar dapat meningkatkan produktivitas, etos kerja dan jiwa kooperatif yang bertanggung jawab.

3. Mengubah hubungan ekonomi yang murni kompetitif dan kecenderungan eksploitatif, menjadi hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara modal besar dan modal kecil, mempersaudarakan konglomerat dengan yang melarat.
4. Reorientasi kebijakan pengembangan ekonomi desa dan kota, yang dapat mengurangi derasannya urbanisasi. Di desa hendaknya dimungkinkan berkembangnya mata pencaharian non-pertanian yang dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sektor pertanian.
5. Memperbaiki kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi, dengan mengurangi dominasi ekonomi yang kurang adil. Bila hal ini tidak terselesaikan keresahan yang sudah lama dirasakan akan menimbulkan kerawanan yang lebih mengkhawatirkan kesatuan dan integrasi nasional.

Sedangkan program da'wah bil hal ekonomi, sebagai berikut:

1. Mengusahakan terbentuknya Labolatori Da'wah Ekonomi, yang bertugas mempelajari, mengkaji dan mengembangkan model-model pengelolaan dan pelebagaan kegiatan ekonomis Islami serta memantau dan mengkaji masalah yang berkembang terutama menyangkut ekonomi umat.
2. Mengembangkan sumber daya dan dana bagi pembangunan umat, dan memanfaatkannya secara kreatif, efisien dan efektif pada sektor ekonomi strategis.

3. Melakukan pendekatan terhadap pimpinan organisasi atau lembaga Islam lain bergerak di bidang ekonomi untuk memperhatikan dan mengembangkan kegiatan ekonomi non-formal dalam rangka pembinaan ekonomi umat.
4. Memperkuat posisi ekonomi umat dengan cara menumbuhkan kembali kepeloporannya di bidang kewiraswastaan pada tingkat menengah dan atas/kuat.
5. Menyiapkan *entrepreneur* dan manager yang terampil, tekun, amanah, jujur dan berakhlak mulia untuk mengelola unit usaha.
6. Menyiapkan *ulil albab* ahli ekonomi dan keuangan yang akan tampil sebagai pakar ekonomi dan menengah '*kadal faqru ayyakuna kufron*' terutama di kalangan umat lapis bawah, yang '*dhu'afa-fukara-masakin*' di desa dan di kota.

Ali bin Abi Thalib r.a. berkata: 'Andaikan kemiskinan itu berbentuk manusia, maka akan ku bunuh'.

D. Kemiskinan dan Pemerataan sebagai Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Kemiskinan dan pemerataan ekonomi tampak menjadi tujuan utama dalam pengembangan ekonomi Islam. Sekalipun tidak ada jaminan bahwa dengan berkembangnya ekonomi berdasarkan syari'at Islam itu maka dengan sendiri-

nya kemiskinan menjadi hilang dalam kehidupan masyarakat. Namun setidaknya-tidaknya, ajaran Islam menggariskan bahwa adanya kemiskinan itu menjadi kewajiban semua pihak dalam mengatasinya. Kewajiban untuk mengatasi kemiskinan itu tidak hanya wajib bagi pemerintah berkuasa, melainkan setiap individu yang diberi amanat sebagai orang kaya, berkewajiban untuk berpartisipasi. Tentang kemiskinan dan menyebarkan pemerataan ekonomi ini, Ahmad Muflih Saefuddin¹¹ menguraikan sebagai berikut.

1. Kemiskinan

Dari zaman ke zaman, ummat manusia selalu dihadapkan kepada kenyataan adanya golongan masyarakat yang miskin. Di samping itu, terdapat sekelompok anggota masyarakat yang dapat digolongkan kaya. Hal ini tidak saja terjadi pada negara-negara yang digolongkan miskin, tetapi juga terjadi di negara-negara yang digolongkan kaya.

Keadaan yang sudah berlaku dari zaman ke zaman itu memberi kesan kepada kita bahwa adanya keadaan kaya-miskin seakan-akan sudah merupakan takdir yang tidak dapat lagi diubah. Kesan itu memang tidak salah karena al-Qur'an membedakan indikasi yang demikian. Karena sedikit banyaknya rizki yang akan diperoleh oleh seseorang merupakan ketentuan Allah. Seperti ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut:

"Allah melebihkan setengah kamu dari yang

¹¹ Lihat dalam: *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1988, 33-38.

setengah dalam hal rizki. Maka tidaklah orang-orang yang dilebihkan itu memberikan rizki mereka atas hamba sahayanya (melainkan Allah juga), maka mereka sama saja padanya. Patutkah mereka ingkar akan nikmat Allah itu.” (QS. 16: 71)

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya.” (QS. 17: 30)

Adanya kelompok kaya dan kelompok miskin disebabkan oleh besar-kecilnya rizki yang mereka terima masing-masing. Allah menciptakan umat manusia di bumi, dilengkapi dengan sarana-sarana untuk hidup, berupa alam dengan segala kemudahan-kemudahan yang terdapat di dalamnya. Bahkan Allah telah menetapkan manusia sebagai khalifah, pengelola bumi ini.

“Dia yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan.” (QS. 67: 15)

Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan rizki memang disediakan, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan-kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini, masing-masing orang dibekali dengan kemampuan. Walaupun manusia dilahirkan sama, namun di dalam perkembangannya manu-

sia dapat memiliki kemampuan yang berbeda, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal orang dapat berbeda dalam tingkat kemampuan, baik kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.” (QS. 6: 165)

Di samping perbedaan secara vertikal, terdapat perbedaan secara horizontal, di mana orang hanya memiliki kemampuan pada sesuatu bidang atau beberapa bidang keahlian. Sehingga dalam masyarakat tumbuh berbagai spesialisasi dalam lapangan pekerjaan.

Adanya perbedaan tingkatan kemampuan, serta spesialisasi, sebenarnya menunjukkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang dalam kehidupan umumnya, dan proses produksi khususnya. Di samping itu, setiap orang menghadapi kenyataan keterbatasan dalam kesempatan, baik karena waktu maupun karena kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Adanya perbedaan dalam kemampuan serta perbedaan dalam kesempatan dapat diduga sebagai sebab-musabab dari perbedaan dalam rizki yang mungkin diterima oleh seseorang.

“Masing-masing mempunyai tingkatan menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah memenuhi balasan pekerjaan-pekerjaan

mereka, sedikit pun mereka tidak teraniaya.”
(QS. 46: 19)

Hal ini lebih menegaskan bahwa orang hanya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Sedang jenis dan tingkatan pekerjaan tertentu memberikan imbalan serta keuntungan yang lebih besar dan jenis dan tingkatan pekerjaan yang lain. Akibat lebih lanjut adalah lahirnya golongan kaya dan miskin di dalam masyarakat. Walaupun perbedaan kadar kaya miskin tersebut dapat berubah-ubah menurut waktu, dan berbeda dan satu masyarakat kepada masyarakat yang lain, hal itu tetap merupakan salah satu masalah besar di dalam masyarakat.

2. Pemerataan

Kenyataan adanya golongan yang kaya berdampingan dengan mereka yang tergolong miskin dalam masyarakat adalah suatu Sunnatullah. Namun sebenarnya kaya-miskin sendiri sifatnya adalah relatif. Seorang yang tergolong kaya di masyarakat yang miskin, mungkin belum tergolong kaya di negara atau masyarakat yang kaya. Sebaliknya seorang yang tergolong miskin dalam masyarakat yang kaya, mungkin belum dipandang miskin dalam masyarakat yang miskin. Adanya kaya-miskin juga bersifat relatif menurut waktu. Sebab orang yang pada suatu saat fakir atau miskin, dapat saja pada saat yang lain menjadi seorang yang kaya; demikian sebaliknya.

Masalah kaya-miskin dalam masyarakat

kadang-kadang dipandang sebagai masalah yang rawan, karena keadaan demikian dapat menimbulkan pertentangan sosial. Perbedaan kaya-miskin yang mencolok dalam masyarakat dipandang juga sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu jurang perbedaan kaya miskin dipandang layak untuk dihapuskan atau paling tidak harus dikurangi.

Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri di dalam memandang masalah kaya-miskin serta jalan-jalan yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah kaya-miskin tersebut.

- 1) Bahwa dalam hidup ini agar kenal-mengenal dan bantu-membantu.

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadirat Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui" (QS 44:13).

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS 5:2)

- 2) Bahwa seorang mukmin dengan yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan yang lain.

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam

hubungan kasih sayang di antara mereka adalah seperti satu badan; apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh badan ikut merasakannya dengan rasa panas dan tidak dapat tidur.” (H.R. Bukhari-Muslim)

- 3) Ummat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang berada dalam kesulitan.

“Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS 17:26 dan 27)

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS 107:1-3)

“Tidaklah beriman kepadaku, orang yang semalaman merasa kenyang, sedang tetangganya kelaparan di sampingnya dan ia pun mengetahuinya.” (H.R. Thabrani)

- 4) Islam mendorong ummat agar selalu beramal dan bersedekah.

“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap butir tumbuh seratus

- *biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi orang yang menghendaki-Nya. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) dan Maha Mengetahui.” (QS. 2: 261)*

“Apa saja yang kamu belanjakan untuk amal kebaikan, pasti akan diganti oleh Allah; Dia adalah sebaik-baik yang memberikan rizki.” (QS. 34:39).

“Bersadaqahlah kamu, sesungguhnya sadaqah itu menjauhkan kamu dari neraka.” (H.R. Thabrani dan Abu Na’iin).

“Jagalah dirimu dari neraka, meskipun hanya dengan mensadaqahkan sebiji kurma.” (H.R. Bukhari-Muslim)

- 5) Bahwa setiap Muslim wajib membayar zakat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. 9: 104)

“Ambillah zakat itu dari orang-orang kaya mereka dan berikan kepada orang-orang fakir mereka.”

“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang diperlunak hatinya, untuk (memerdekakan) budak,

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (sabilillah) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. 9: 60)

Hampir semua golongan yang berhak atas zakat adalah golongan yang secara ekonomis adalah lunak, baik secara insidentil ataupun secara permanen, kecuali ‘amil atau pengurus zakat.

Untuk mengusahakan pemerataan perlu ada redistribusi pendapatan dan kekayaan dari yang punya kepada yang tidak punya, dari yang kaya kepada yang fakir atau miskin. Jalan bagi redistribusi telah kita peroleh petunjuknya sebagaimana disebutkan pada bagian yang terdahulu, yang meliputi: tolong-menolong, sedekah, membayar zakat, semuanya dengan dorongan di samping keagamaan. Masalah yang timbul adalah bagaimana redistribusi itu harus dilaksanakan dalam masyarakat, cara yang bagaimana yang harus kita tempuh.

Dalam memberikan pertolongan kepada anggota masyarakat yang miskin dan golongan masyarakat lemah lainnya seperti yatim piatu, orang-orang yang terlibat utang dan sebagainya, kita dapat menggunakan cara pendekatan sebagai berikut:

Cara pendekatan parsial

Dalam hal ini, pertolongan kepada yang tergolong miskin dilakukan secara langsung, dan bersifat insidentil tergantung tersedianya

dana dalam masyarakat. Bahkan termasuk pula pertolongan langsung yang diberikan oleh orang-orang yang mampu kepada orang-orang miskin. Dengan cara ini, masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.

Cara pendekatan struktural

Cara pendekatan ini mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinyu. Tujuan akhir justru mengangkat golongan miskin dan lemah agar mereka dapat mengatasi kemiskinannya. Bahkan dari golongan yang dibantu diharapkan mereka nantinya menjadi golongan yang turut membantu di dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini akan dicari sebab-sebab dari kemiskinan atau kelemahan itu dan berusaha mengatasi sebab-sebab yang menjadikan mereka itu miskin atau lemah. Kalau yang menjadi sebab kemiskinan adalah tiadanya pekerjaan, tentu saja pekerjaan yang perlu diberikan. Kalau dia seorang yang mempunyai kecakapan dan yang diperlukan tambahan modal, maka kepada mereka diberikan modal. Kalau yang diperlukan adalah biaya pendidikan, maka beasiswa yang perlu diberikan kepada mereka.

Dengan cara ini diharapkan pemecahan masalah tidak secara insidental, tetapi justru mengubah dasar yang menjadi sebab dari kemiskinan atau kelemahan itu. Dalam pendekatan kedua ini diperlukan lembaga Baitul-Mal yang kuat, yang dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan kelemahan yang diderita oleh banyak anggota masyarakat.

E. Perbankan Syariah dan Perkembangannya

1. Sejarah Perbankan Syariah¹²

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis pengusaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar investasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan menyediakan dana untuk proyek pembangunan

¹² Tulisan ini dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_Syariah

di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis *fee* dan *profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Di Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an hingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi

bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

2. Prinsip Perbankan Syariah

Pinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- Unsur *Gharar* (ketidakpastian, spekulasi) ti-

dak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

3. Produk Perbankan Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

a. Jasa untuk peminjam dana

Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Musharakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.

Murabahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang

yang dibutuhkan penggunajasa yang kemudian menjualnya kembali ke penggunajasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

Takaful (asuransi Islam).

b. Jasa untuk menyimpan dana

Wadiah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadiah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

c. Tantangan Pengelolaan Dana

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dan

15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun.

Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 23 8,6 miliar, meningkat 47 persen dan tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dan total aset perbankan nasional.

Di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.

Implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah.

Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah, antara lain ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau *sukuk* yang dipersiapkan pemerintah.

Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan *sukuk* dengan membuka unit usaha syariah.

Sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah konversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

d. Penghimpunan dana

Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan *office channeling* yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.

Sampai saat ini, *office channeling* baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah.

Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu.

Sementara tahap awal *office channeling* BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor

cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.

General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh *delivery channel* yang dimiliki BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah.

Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan *office channeling*.

Dana terkumpul juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terkumpul dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan.

Dana haji yang terkumpul dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terkumpul itu bahkan cukup menarik ba-

gi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.

Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarmanto, bagi bank syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional.

"Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional," kata Adiwarmanto menjelaskan pola perilaku nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.

Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional).

Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.

Namun di sisi rasio pembiayaan yang bermasalah (*non-performing financings*) pada perbankan syariah tercatat naik dan 2,82 persen pa-

da Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret 2006 lalu. Rasio ini dinilai masih terkendali.

Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah.

Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk kemaslahatan.

4. Peran Perbankan Syariah¹³

Di kalangan umat Islam, ekonomi kerakyatan lebih dikenal dengan ekonomi umat mengingat mayoritas penduduk negara kita umat Islam. Oleh sebab itu, bila berbicara ekonomi kerakyatan, identik dengan ekonomi umat atau ekonomi keumatan.

Keinginan umat Islam bangkit di bidang ekonomi dengan melaksanakan sistem ekonomi sesuai dengan syariah Islam terwujud ketika Bank Muamalat dan beberapa BPR Syariah lahir pada awal 1990-an. UU No. 7/1992 mengakomodasi bank yang berpraktik dengan sistem bagi hasil.

Ketangguhan sistem ekonomi syariah, khu-

¹³ Tulisan ini merupakan ringkasan dari buku H. Uce K. Suganda, yang lain. Lihat, *Peran Perbankan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat*, Bandung: 2006, 22-30.

susnya perbankan syariah, terbukti saat negara kita didera krisis moneter yang kemudian menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Keguncangan sistem perbankan konvensional pada pertengahan tahun 1997 berdampak negatif terhadap sistem perekonomian nasional. Kondisi tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah Orde Baru yang memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada beberapa bank yang dinilai kurang sehat serta tidak memenuhi syarat untuk terus melanjutkan operasinya.

Bantuan yang diberikan ternyata tidak menyelesaikan masalah, tetapi sebaliknya membuat keadaan menjadi lebih buruk dan semakin parah. Kepercayaan nasabah terhadap bank-bank konvensional turun secara drastis, bahkan di antaranya ada yang mengalami *rush* akibat penarikan uang dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan.

Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi dengan sistem syariah ternyata mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang krisis ekonomi yang menerpa bangsa kita. Sistem syariah yang menjadi asas utama dalam transaksi bank tersebut ternyata dinilai cukup efektif untuk meminimalisasi kerugian kedua belah pihak (pihak bank dan nasabahnya). Bank Muamalat tidak terkena imbas *negative spread* seperti halnya bank konvensional.

Kekuatan Bank Muamalat ternyata bukan terletak pada besarnya rasio kecukupan modal yang dimilikinya melainkan justru terdapat pa-

da sistem *lose and profit sharing* (untung dan rugi bagi sama) yang diterapkannya. Dari aspek etos kerja, sistem ini dapat memacu kedua belah pihak untuk tetap menggunakan modalnya dalam koridor bisnis produktif dan sedapat mungkin menghindari bisnis konsumtif yang justru dapat mengurangi modal yang telah dimiliki.

Becermin pada keberhasilan Bank Muamalat tersebut, para ahli ekonomi kemudian secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi Islam yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Dengan direvisinya UU No.7/1992 dengan UU No.10/1998, bank umum dimungkjinkan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Sejak saat itu, bermunculanlah cabang-cabang syariah dari beberapa bank umum. Perkembangannya pun saat ini cukup menggembirakan.

Data Bank Indonesia menunjukkan hingga akhir 2005 total aset perbankan syariah mencapai Rp 20,88 triliun atau 1,31% dari aset perbankan nasional. Angka ini lebih tinggi dari aset perbankan syariah pada 2004 yang mencapai Rp 15,31 triliun atau 1,26% dan total aset perbankan nasional. Dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 15,58 triliun atau naik dan tahun sebelumnya yang hanya Rp 11,67 triliun.

Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 15,23 triliun atau 2,18% dari perbankan nasional. Angka itu naik 32,54% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 11,492 triliun. Adapun rasio pembiayaan terhadap modal (*Financing to Debt Ra-*

tio-FDR) pada 2005 mencapai 97,8% dengan pembiayaan macet (*NonPerforming Financing-NPF*) sebesar 2,8%.

Sebagian besar atau sekitar 64,6 persen pembiayaan disalurkan pada sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro. Adapun sisanya sebesar 35,4% disalurkan pada sektor non-UMKM.

Sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, bank syariah mengembangkan pola pembiayaan bersifat investasi (bagi hasil) dan jual beli. Bank syariah juga mampu mengembangkan jaringan (*network*) antara lembaga keuangan mikro dan UKM serta bisa berperan dalam pembinaan dan bantuan teknis manajemen.

Dalam upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan, perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, terutama karena berorientasi pada manfaat bukan maksimalisasi keuntungan semata; pengelolannya dengan nilai-nilai syariah (*Sidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah* <STAF>). Transaksi di bank syariah juga riil bukan spekulatif; kemitraan yang dibangun bukan debitur-kreditur; usaha yang dibiayai pun harus yang halal bukan hanya *profitable*; Yang paling penting, bank syariah memperlakukan uang sebagai instrumen bukan komoditas.

Adapun produk-produk pembiayaan bank syariah terdiri dari:

- Modal Kerja: *musyarakah* dan *mudharabah*;
- Piutang: *murabahah, istishna, salam, ijarah*;

- Pinjaman: *qard*.

Peningkatan Pendapatan

Meningkatnya jumlah penduduk miskin belakangan ini membuat kita semua prihatin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah penduduk miskin dalam angka yang cukup besar. Padahal, sebelumnya pemerintah telah berhasil menekan jumlah penduduk miskin hingga ke angka yang cukup signifikan.

Pada 1970 penduduk miskin tercatat sebanyak 68%. Angka ini turun drastis pada 1996 hingga hanya 11%. Akan tetapi, ketika krisis ekonomi mendera negara kita, angkanya melonjak hingga mencapai 23,4% hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Pada 1999 jumlah orang miskin di Indonesia meningkat menjadi 47,9 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 15,6 juta orang berada kawasan perkotaan dan 32,3 juta orang di perdesaan.

Di samping itu, masih ada sekitar 25% penduduk Indonesia yang diperkirakan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia dapat dikategorikan miskin atau rentan terhadap kemiskinan.

Mengingat sangat krusialnya masalah kemiskinan ini, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 2000-2004 dan Propenas 2001-2004, pemerintah mengindikasikan masalah kemiskinan sebagai salah satu masalah utama pembangunan nasional. Dalam dua dokumen tersebut, disebutkan bahwa pembangunan pada ha-

ekatnya adalah upaya penanggulangan kemiskinan. Bersama dengan itu, di tingkat pusat juga dibentuk suatu komite penanggulangan kemiskinan.

Salah satu informasi mengenai kemiskinan yang cukup komprehensif adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indeks ini dikembangkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) yang sebelumnya sudah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri kemudian menjadi cukup populer dan dijadikan salah satu alat ukur kemajuan pembangunan pada berbagai negara di dunia.

Indeks Kemiskinan Manusia dikatakan komprehensif karena merupakan komposit dari beberapa variabel yang mewakili indikator-indikator utama yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sosial-ekonomi. Pemilihan indikator-indikator utama tersebut merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari realitas yang kompleks untuk menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif dari sedemikian luasnya dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Seperti halnya tingkat kemiskinan nasional, dalam lingkup Provinsi Jawa Barat pun tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Nilai IKM untuk Provinsi Jawa Barat meningkat dari 26,3 pada 1995 menjadi 26,9 pada 1998. Selain peningkatan tersebut, yang lebih menyedihkan, tingkat kemiskinan di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dan tingkat kemiskinan nasional yang mem-

punya nilai IKM 25,2.

Dengan nilai IKM seperti itu, berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh UNDP, derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat berada pada klasifikasi menengah-tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat relatif masih tinggi dan diperlukan kerja keras untuk menanggulangnya.

Tingkat kemiskinan yang cukup mengkhawatirkan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, diantaranya, dengan meningkatkan pendapatan rakyat agar terbebas dari perangkap kemiskinan.

Dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) misalnya, dan fakta-fakta di lapangan bahwa ekonomi rakyat itu banyak bergumul di koperasi, usaha kecil, menengah, dan mikro baik yang ada di kota maupun di pedesaan, maka keterlibatan bank syariah dalam upaya membantu ekonomi masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan.

Karena itu dengan pola kemitraan tersebut, bank syariah bisa menempatkan dananya di BPR syariah atau di BMT/LKMS yang dananya bisa disalurkan kepada para pengusaha kecil, menengah, dan mikro. Dari situ kemudian diharapkan ekonomi masyarakat kecil itu dapat berkembang sehingga pendapatan masyarakat pun meningkat.

Karea itu, peluang bank syariah untuk memainkan peran sosial sekaligus ikut aktif dalam memerangi kemiskinan di Indonesia pada umum-

nya dan di Jawa Barat pada khususnya, terutama dewasa ini adalah munculnya animo masyarakat dan trend merebaknya Bank Syariah semakin besar, hal itu terkait dengan adanya kesadaran bahwa ekonomi syariah telah menjadi suatu alternatif untuk dapat ikut berperan serta dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di Indonesia. Karena pada prinsipnya, perbankan syariah yang menganut sistem ekonomi Islam, merupakan sistem perbankan yang berbeda dengan Bank Umum. Adanya bagi hasil dengan transparansi produk yang jelas antara debitur dan kreditur merupakan nilai lebih dimana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Bagian Keempat:
**NILAI-NILAI AJARAN ISLAM
UNTUK PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT**

A. Aktualisasi Ajaran Islam untuk Solidaritas Sosial

Perwujudan ajaran Islam membenteng dalam sistem kehidupan manusia yang menyangkut moral, tata nilai, norma dan aturan yang bersifat transendental. Tetapi inti ajarannya tidak hanya terletak pada aspek ritual yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Yang Maha Kuasa, tetapi juga aspek sosial untuk memelihara hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya, dan bahkan antara manusia dengan alam lainnya.

Karena itu, pada tingkat kemajuan peradaban manusia apapun, agama pada akhirnya tetap menjadi alternatif perlindungan bagi berbagai persoalan yang bisa ataupun yang tidak bisa diselesaikan oleh kemampuan akal dan daya nalar manusia. Peradaban modern yang cenderung materialistik seperti sekarang ini bisa saja atau bahkan mungkin telah melahirkan manusia-manusia yang kehilangan keseimbangan fisik-material dan mental spiritual.

Ia memberi perhatian terhadap aspek fisik-material lebih dari apa yang diberikannya kepada aspek spiritual. Sehingga manusia mo-

dern sekarang ini, tampak seakan didorong untuk memasuki satu peradaban yang bercorak sangat fisikal dan materialistik. Akibatnya, umat manusia mengalami ketidakseimbangan dalam mengembangkan unsur pembentuk dirinya. Dan itu semua pada dasarnya merupakan proses de-humanisasi yang cukup mengkhawatirkan.

Persoalan lain yang juga sulit dihindari serta cukup berpengaruh kuat terhadap upaya pembentukan kualitas manusia, adalah semakin gencarnya proses globalisasi yang terjadi hampir dalam semua sektor kehidupan manusia. Bila pada awalnya ia hanya terjadi dalam aspek informasi, pada tahapan berikutnya globalisasi juga terjadi pada aspek-aspek lainnya. Dalam cara hidup, cara makan, dan lain-lain, akhir-akhir ini telah semakin terbentuk oleh kebudayaan global. Sehingga jenis-jenis makanan Eropa dan Amerika misalnya, kini bukan sesuatu hal yang sulit ditemukan di daerah kita sendiri.

Beberapa isu sosial yang diakibatkan oleh persoalan tersebut, cepat atau pun lambat, akan juga melibatkan aspek kehidupan beragama. Karena globalisasi makanan, umat beragama akan menemukan problema baru dalam menentukan halal-haramnya sesuatu makanan yang memang sebelumnya tidak pernah ditemukan. Bahan bacaan dan tontonan juga bisa saja merombak tradisi dan kebudayaan setempat. Ini juga akan menjadi masalah yang menuntut perhatian ekstra kita semua.

Dalam bidang-bidang kehidupan yang bersifat fisikal seperti itu, mungkin dampaknya ti-

dak terlalu mengawatirkan. Tetapi bagaimana bila ia telah memasuki bidang-bidang non-fisik, baik menyangkut moral kehidupan atau pun etika kebudayaan. Dampaknya akan menjadi laten, dan konsekuensinya menjadi persoalan yang sulit diselesaikan.

Dalam tatanan kehidupan seperti itulah, agama kemudian sangat diperlukan sebagai kekuatan pengimbang yang sekaligus juga dapat memberikan solusi sesuai dengan watak alamiah manusianya. Karena itu, di tengah-tengah perkembangan hidup yang cenderung pesimistik tersebut, ada hal yang cukup menggembirakan, yaitu terus tumbuh dan berkembangnya semangat keberagamaan masyarakat Indonesia. Kegairahan umat dalam melaksanakan ajaran agama terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ini adalah modal yang cukup potensial bila dikaitkan dengan kehendak bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan melalui sektor agama pulalah pembangunan secara keseluruhan akan dapat ditunjang. Karena itu, kegiatan keagamaan misalnya dalam rangka kesetiakawanan sosial, adalah kegiatan yang sangat tepat dan perlu terus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti itu. Dan tentu saja kesetiakawanan sosial bukan hanya tercermin secara fisik, tetapi juga jauh sampai pada persoalan-persoalan substansial. Sebab cinta mencintai dengan sesama manusia, memiliki perasaan solidaritas sosial yang tinggi, adalah di antara inti ajaran agama, khususnya agama Islam. Sehingga se-

orang muslim yang baik, sesungguhnya adalah juga seseorang yang memiliki sikap kesetiakawanan sosial yang baik pula. Sebaliknya, tidak dikatakan muslim yang sempurna, bila masih kering dari rasa kesetiakawanan sosial dengan sesamanya.

Lebih tegas lagi dinyatakan dalam tatanan hukum Islam bahwa yang menelantarkan anak yatim itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap ajaran agama. Maka jika tatanan ini dipakai sebagai batas minimal, tentu membiarkan kebodohan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial lainnya yang terjadi di masyarakat merupakan bentuk pengingkaran yang nyata terhadap ajaran agama.

Sayangnya, tata ajaran ini tampak kurang dihayati. Banyak orang mengira, tugas melaksanakan ajaran telah selesai, ketika orang sudah shalat lima kali sehari semalam, puasa bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Banyak pula orang menyangka bahwa pengajian-pengajian dianggap sudah berhasil, kalau majelis ta'lim sudah penuh sesak dengan jamaah, kalau shalat berjamaah Tarawih telah menjadi budaya global masyarakat. Padahal pada saat yang sama, di gubuk-gubuk kotor, dan di sepanjang jalanan yang biasa kita lalui bersama, sejumlah manusia merintih perih hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan maknanya secara layak. Panti-panti asuhan dan yatim piatu masih kering dari sentuhan tangan orang-orang yang punya. Dan di tempat lain, masih banyak orang Islam tidak mampu melan-

jutkan sekolah hanya karena soal biaya. Maka, sesungguhnya dalam dataran sosial seperti inilah, ajaran Islam belum seutuhnya dilaksanakan.

Padahal Islam adalah agama yang memancarkan kekuatan pembebas umat manusia dari berbagai kelemahan dan keteringgalan. Watak Islam mampu menembus hampir seluruh pelosok dunia. Watak kesetiakawanan yang melekat pada para penyebar agama ini telah mampu membentuk konfigurasi kekuatan raksasa untuk menggiring umat manusia berbondong-bondong memeluk agama yang dianggapnya baru.

Bahkan sepanjang hidupnya, Rasulullah selalu berpihak kepada kelompok yang lemah. Ketika beliau berada di Mekkah, misalnya, hanya sedikit saja di antara para pengikutnya berasal dari kelompok kaya. Selebihnya, puluhan jiwa berasal dari kelompok-kelompok miskin. Sejarah pun mencatat bahwa kelompok yang lebih dahulu masuk Islam, adalah orang-orang miskin, budak-budak belian, yatim piatu, dan sebagainya. Sehingga Rasulullah pun mewasiatkan agar kita senantiasa berada di tengah-tengah kelompok yang lemah.

Karena itu di antara misi terpenting Islam, adalah membela, menyelamatkan, membebaskan, melindungi, dan memuliakan golongan yang lemah. Sebuah Hadits meriwayatkan bahwa Allah hanya menerima shalatnya orang-orang yang menyayangi orang miskin. Konon pula, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT "*Tuhanku, di mana aku harus mencariMu*", maka

Allah pun menjawab, "*carilah Aku di tengah-tengah mereka yang hancur hatinya*".

Di antara kelompok manusia yang dikategorikan lemah ini adalah yatim piatu. Maka seharusnya santunilah mereka, merdekakanlah mereka dari penderitaannya, bebaskan mereka dari rintihan yang melilit kehidupannya. Berbuat baik kepada yatim merupakan salah satu tanda orang yang benar imannya.

B. Makna Sosial Idul Fitri

Kegiatan yang bernuansa keagamaan yang dilakukan umat Islam setiap kali datang bulan Ramadhan ini adalah merupakan salah satu contoh dari semakin semaraknya kegiatan keagamaan masyarakat. Bila pada beberapa tahun yang lalu, pengajian-pengajian hanya terselenggara di masjid-masjid atau pun majelis-majelis ta'lim, sekarang hal itu bukan lagi menjadi ciri kepesantrenan, tetapi sudah berubah menjadi fenomena sosial secara global.

Pada setiap bulan Ramadhan tiba, kegairahan masyarakat baik yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian di majelis-majelis ta'lim, remaja-remaja masjid maupun pengajian di instansi-instansi tempat kerja sehari-hari, terus meningkat dari waktu ke waktu. kegiatan itu terus berlangsung bukan hanya ceramah-ceramah keagamaan yang dapat memberikan siraman-siraman rohani terus mewarnai acara-acara silaturahmi ataupun dalam bentuk *halal bihalal*.

Semua ini tidak terlepas dari mata rantai sejarah Islam di Indonesia, bahwa usaha wali sembilan dalam menyebarkan Islam tidak pernah kenal waktu dan tempat. Melalui pengajian-pengajian mereka memperkenalkan Islam ke setiap pojok kehidupan umat manusia, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati suasana beragama yang semakin nyaman dan penuh kearifan. Inilah di antaranya yang patut disyukuri bersama.

Dulu mungkin pembinaan keagamaan masyarakat hanya berlangsung secara tradisional, melalui pengajian di pesantren-pesantren ataupun madrasah-madrasah dengan metode ataupun pendekatan yang juga konvensional. Sekarang, situasi itu telah berubah lebih maju. Sebab kegiatan keagamaan dapat dinikmati di mana saja, di sekolah-sekolah umum, di hotel-hotel, di perusahaan-perusahaan swasta maupun di instansi-instansi pemerintah, termasuk ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi dharma wanita dan organisasi-organisasi perempuan lainnya pun terus meningkatkan kegairahan dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai keagamaan.

Maka dalam tatanan kehidupan beragama seperti itu, sesungguhnya memiliki arti strategis bagi upaya peningkatan prestasi kerja. Sebab pembinaan kesadaran spiritual umat agama ini dapat menjadi sumber motivasi tumbuh dan berkembangnya dinamika kerja yang lebih baik, lebih disiplin dan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Karena itu, pendekatan agama dalam peningkatan kualitas kerja menempati posisi penting, tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan aspek finansial yang biasanya dijadikan sumber insentif dalam proses pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, tanpa melibatkan aspek agama dalam mensukseskan gerakan disiplin nasional, tampaknya hanya akan mengakibatkan kepincangan kerja. Sebab disiplin sesungguhnya lebih banyak mengangkat aspek mental seseorang.

Makna Silaturahmi Idul Fitri.

Sekali dalam setiap tahun, umat Islam di seantero dunia merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Pada hari itu, takbir bergema mengisi jagat menggetarkan kesadaran persaudaraan yang berakar pada prinsip tauhid. Di sini umat Islam meluapkan kegembiraannya atas kemenangan perjuangannya selama satu bulan penuh, berpuasa menahan lapar dan dahaga, mengendalikan diri dari ancaman hawa nafsu.

Bagi umat Islam, Idul Fitri merupakan peristiwa penting dan monumental. Selain berfungsi sebagai sarana berbagi rasa, Idul Fitri juga mengisyaratkan semangat egaliter untuk mencairkan berbagai kesenjangan sosial ekonomi di antara sesama manusia. Hal ini pula yang menjadi napas pembangunan yang sedang kita tempuh saat ini. Target pembangunan sekarang ini adalah berupaya menurunkan kualitas dan kuantitas kemiskinan, dari tingkat absolut hingga pada tingkat relatif.

Upaya memberantas kemiskinan, membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk keter tindasan, hal itu merupakan salah satu perwujudan dari ajaran ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai buah dari amal ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh. Sebab secara teologis, puasa memang bertujuan membentuk manusia bertaqwa.

Dalam konteks pembangunan nasional, taqwa telah ditetapkan sebagai landasan utama yang menggerakkan roda pembangunan. segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional.

Kaitannya dengan momentum Idul Fitri yang mengandung makna kembali kepada kesucian itu, ialah mengisyaratkan kebersihan jiwa sesuai dengan watak ajali diciptakannya manusia itu sendiri. Karena itu, Idul Fitri menjadi simbol kesatuan jiwa dan raga. Semua manusia dianggap sama, semua makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan.

Momentum Idul Fitri yang dimanfaatkan untuk media silaturahmi, saling memaafkan, dan menaburkan benih-benih persaudaraan atas dasar cinta kasih sesama manusia, yang kemudian mengikat persaudaraan dalam tali kesatuan umat; itu seharusnya menumbuhkan semangat solidaritas sosial sebagai sikap pengakuan

atas persamaan hak, sekaligus penolakan atas berbagai bentuk diskriminasi.

Sebelum merayakan hari raya Idul Fitri, semua umat Islam diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, suatu bentuk ibadah yang berdimensi ganda: sosial dan spiritual. Maka melalui ibadah zakat ini, umat Islam berbagi rizqi agar saudara-saudaranya sesama umat Islam yang masih tergolong miskin dapat ikut merasakan kebahagiaan yang sama dengan saudara-saudaranya yang telah lebih dulu mendapatkan kesempatan kaya. Karena itu, zakat memiliki dimensi sosial dengan tujuan utamanya memperkecil atau bahkan menghapuskan berbagai bentuk kesenjangan dan kecemburuan.

Demikian kiranya ungkapan kebahagiaan dalam menyambut hari raya Idul Fitri tersebut muncul bukan hanya dalam bentuk pengejawantahan yang verbalistik, namun juga pengejawantahan kultural. sehingga mampu menggerakkan perilaku keberagamaan yang positif. Kesadaran mengeluarkan zakat meningkat dari tahun ke tahun; masjid-masjid terus bertambah bukan hanya dalam jumlahnya, tetapi juga dalam kualitas kegiatannya.

Sementara dalam komunitas ilmiah, momentum silaturahmi semacam itu, seharusnya berfungsi bukan saja sebagai media mempertemukan diri secara fisik, tetapi juga sebagai wahana pertemuan berbagai konsepsi, pikiran dan gagasan. Meskipun secara etimologis silaturahmi berarti menyambungkan rahim antara dua orang atau lebih, dalam konteks pendi-

dikan, silaturahmi juga mengandung makna ilmiah sebagai sarana untuk mentransformasikan pesan-pesan intelektual sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing.

Melalui kesempatan silaturahmi seperti itu, kita dapat membina, memelihara ataupun melanggengkan tradisi intelektual masyarakat. Karena hanya dengan pembinaan tradisi seperti inilah kita akan dapat membangun masa depan bangsa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang menyertainya.

Pada era globalisasi yang sekarang kita masuki bersama ini, posisi marjinal suatu bangsa tidak lagi dapat dipertahankan sesuai dengan wataknya yang orisinal. Interaksi intensif antar masyarakat di berbagai belahan dunia manapun kini telah menjadi ciri penting perkembangan dan perubahan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Karena itu, jika kita terlambat mengantisipasi kenyataan ini, kita tidak akan pernah bisa membayangkan bentuk dan warna masyarakat kita pada masa-masa yang akan datang. Ke mana arah perubahan yang akan terjadi? apa yang bisa dilakukan? serta bagaimana seharusnya berbuat? Ini semua merupakan pertanyaan yang memerlukan kajian serius di kalangan akademisi.

Di antara konsekuensi sosial ekonomi dari realitas masyarakat seperti itu, maka perkembangan tata ekonomi kini semakin sulit diprediksi. Sehingga pada tingkat tertentu, kondisi seperti itu dapat melahirkan berbagai ketimpangan sosial yang juga sulit dipecahkan. Ber-

bagai masalah menyangkut ekonomi dan pembangunan yang sering disaksikan dan dirasakan, ataupun hanya sebatas yang didengar, adalah merupakan masalah-masalah yang senantiasa bersentuhan langsung ataupun tidak langsung dengan kehidupan hidup umumnya masyarakat.

Karena itu, kegiatan silaturahmi yang biasa dilaksanakan pada suasana Idul Fitri, seharusnya tidak disikapi hanya sebatas tradisi masyarakat yang berlangsung secara formalitas dan bahkan turun temurun. Tetapi lebih dari itu, silaturahmi merupakan khazanah kebudayaan masyarakat yang memiliki banyak muatan moral, sosial, maupun muatan intelektual.

Berbagai kepincangan yang diakibatkan oleh kurang-seimbangan antara dua kemajuan itu sewaktu-waktu dapat muncul dan merugikan kehidupan manusia. Bentuk-bentuk penyelewengan sosial yang dilakukan oleh sebagian kalangan ilmuwan, seperti munculnya masalah pengrusakkan lingkungan sebagai akibat penerapan pengetahuan dan teknologi, hal itu merupakan satu di antara contoh kasus teralienasinya ilmu pengetahuan dari agama.

Karena itulah, gagasan perlunya menyeimbangkan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan peningkatan kualitas iman dan takwa (Imtak) merupakan gagasan yang perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya melalui lembaga-lembaga sosial dan agama serta pendidikan. Di sinilah

makna strategis pendidikan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Di sinilah tempatnya persentuhan positif antara agama dan negara; agama memerlukan perlindungan negara, dan negara juga membutuhkan suntikan spiritual, sehingga kemajuan apapun dari perjalanan pembangunan yang ditempuhnya penuh terisi dengan muatan-muatan moral dan mencerminkan watak bangsa yang memiliki akhlaqul karimah.

Semangat persaudaraan dari suasana 'idul fitri ini seharusnya mampu mewarnai iklim persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Dalam suasana kesatuan dan persatuan yang utuh itu akan dapat menciptakan stabilitas keamanan, sosial, politik, dan juga ekonomi.

C. Fungsionalisasi Zakat dalam Pencapaian Kesejahteraan Sosial¹

Zakat adalah salah satu ketentuan yang bersifat wajib dalam agama Islam. Ia adalah salah satu rukun Islam yang lima. Jelasnya, rukun Islam nomor empat. Dalam suatu masyarakat Islam, zakat merupakan suatu perintah yang harus ditunaikan. Sungguh pun demikian, kewajiban zakat sebenarnya berlaku bagi individu, yaitu mereka dan hanya mereka yang memi-

¹ Artikel ini merupakan tulisan M. Dawam Rahardjo, lihat dalam: *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1988, hlm. 39-49.

liki suatu jenis kekayaan tertentu yang jumlahnya telah mencapai hitungan atau nisab. Rumusan tentang perintah dan kewajiban zakat itu terdapat di dalam al-Qur'an. Mengingat begitu banyaknya perintah zakat ini disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an bersama-sama dengan perintah shalat (tidak kurang dari 82 kali), kita dapat menarik kesimpulan tentang penting dan pokoknya rukun Islam ini. Apabila shalat disebut sebagai *ibadat badaniyah*, maka zakat disebut sebagai *ibadat amaliyah*. Jadi, zakat, oleh para ulama dikategorikan sebagai "ibadat", yaitu tata-cara manusia mengabdikan kepada Allah. Artinya, penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal.

Sudah tentu zakat merupakan konsekuensi dari akidah, yaitu cara manusia berkepercayaan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Zakat, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan pada kepercayaan kepada Allah. Seorang Islam yang membayar zakat, berbuat demikian karena Allah. Ia tidak hanya sekadar ingin memberi uang kepada fakir miskin umpamanya. Ia berbuat begitu karena perintah Allah, karena mengabdikan kepada Allah. Jadi zakat didasarkan kepada kesadaran religius. Tindakan seseorang yang berzakat bukanlah, umpamanya, tindakan ekonomi. Artinya, bukan motif ekonomilah yang mendorong orang berzakat. Zakat itu sendiri secara harfiah berarti "suci" atau "bersih". Dengan berzakat, orang telah membersihkan hartanya. Dan de-

ngan membersihkan hartanya itu, orang menjadi lebih dekat kepada Allah.

1. Kewajiban Zakat di Zaman Nabi

Kewajiban zakat ini sudah dimulai sejak Rasulullah saw masih tinggal di Makkah. Namun pemenuhan kewajiban ini secara umum sebagai tanggungjawab sosial baru terjadi pada tahun kedua Hijrah. Nabi sendiri telah mengutus wali-wali (gubernur-gubernur) ke daerah-daerah untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya yang telah berkewajiban untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Teladan Nabi ini kemudian diikuti oleh para sahabat dan para khalifah. Kewajiban zakat ini, dalam komunitas Muslim, tidak bisa dipisah-pisahkan dari salat. Ketika Umar bin Khathab berusaha mengemukakan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar Shiddiq untuk memperbedakan kedua ibadat itu, sang Khalifah langsung marah. Ia menyatakan sikapnya kalau perlu memerangi siapa saja yang membangkang untuk membayar zakat.

Sikap Khalifah Abu Bakar Shiddiq itu berakibat cukup jauh. Para ulama umumnya ternyata menyetujui penafsiran Abu Bakar tersebut. Yaitu, bahwa zakat ditafsirkan sebagai suatu kewajiban yang tidak semata-mata terserah kepada kesadaran seseorang untuk melaksanakannya atau tidak. Zakat bukan ibadat yang terutama tertuju pada diri sendiri dan hanya merupakan urusan seseorang dengan Tuhan.

Dengan perkataan lain, zakat bukan hanya menyangkut kewajiban seseorang saja. Ia mengandung kewajiban bagi setiap orang yang telah memenuhi kriteria, tapi juga sekaligus mengandung hak pada orang-orang miskin atas kekayaan masyarakat yang berlebih.

Zakat bukanlah satu-satunya sumber dana umum dalam sistem masyarakat Islam, karena kita mengenai juga shadaqah, infaq, waqaf, dan sebagainya. Demikian pula, sebagaimana dilaporkan oleh Zainal Abidin Ahmad dalam *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, zakat pada mulanya, terutama pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Shiddiq, adalah sumber penerimaan umat yang paling utama. Tapi mulai dengan pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab, sumber penerimaan negara berkembang sebagai akibat ekspansi teritorial ke wilayah-wilayah jajahan kerajaan Romawi. Maka kemudian dikenal-lah jenis-jenis penerimaan negara yang lain seperti: *kharaj* (berbagai jenis pajak, khususnya pajak atas tanah), *jizyah* (pajak kepada golongan non-Muslim sebagai semacam pengganti zakat, atau sebagai uang pengganti wajib militer), *usyr* (pungutan-pungutan atas barang-barang yang masuk, atau semacam cukai impor, dan juga ada kalanya pajak tanah bagi orang Islam dimasukkan dalam katagori ini), *dzaraib* (pajak tambahan bagi orang-orang yang sangat kaya untuk dana tambahan ketika negara membutuhkan-nya dalam keadaan darurat), *kira'ul ardhi* (pajak yang dikenakan pada pengusahaan tanah yang disewa dari negara), dan sebagainya. Sebagaimana dilaporkan juga oleh Zainal Abidin Ah-

mad, hasil studi Gazder menyatakan bahwa zakat dalam pemerintahan Islam kemudian tidak lagi merupakan sumber pemasukan terpenting, yaitu jatuh ke urutan keenam di antara 12 macam jenis pemasukan uang negara (*mawarid ba-it al-mal*).

Hal lain yang penting untuk kita catat di sini adalah kebijaksanaan Khalifah Utsman bin Affan yang ternyata, berbeda dengan kebijaksanaan Abu Bakar r.a., Khalifah menyerahkan zakat kepada kesadaran anggota ummat sendiri. Dengan perkataan lain, negara tidak lagi memaksakan kepada individu untuk membayar zakat kepada negara. Kita juga ingat akan sikap Khalifah Umar bin Khaththab, yang sebenarnya juga kurang setuju dengan Khalifah pertama, tentang menyederajatkan kewajiban zakat dengan shalat—sikap yang menyebabkan Abu Bakar marah besar terhadap Umar. Seperti kita makium, Umar adalah seorang administrator ulung dan berpandangan jauh. Ia misalnya menggantikan para panglima perang dengan tokoh-tokoh administrator semacam Abu Ubaidah untuk menjadi gubemur di masa damai. Pada masa Umar itu, administrasi negara berkembang pesat dan beriringan dengan itu keuangan negara berkembang pula sehingga menempatkan zakat sebagai bukan satu-satunya sumber pemasukan negara yang terpenting. Dan akhirnya Utsman mengambil sikap yang nampaknya membedakan zakat dengan pajak serta sumber-sumber pemasukan negara guna membiayai pemerintahan.

2. Perbedaan antara Zakat dan Pajak

Dapatkah zakat disamakan atau dimiripkan dengan pajak? Pajak adalah kewajiban ekonomi atau kewajiban administratif yang ditetapkan berdasarkan nasional penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan ekonomi, padahal zakat adalah suatu kewajiban keagamaan, walaupun ditafsirkan sebagai bisa dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum dan oleh kekuasaan negara. Secara teknis juga dapat ditarik perbedaan antara pajak dan zakat.

Pertama-tama dapat disebutkan di sini bahwa pajak ditarik atau sebagian pajak ditentukan karena anggapan bahwa si pembayar pajak diperkirakan akan atau sudah menikmati ataupun mengambil manfaat dari barang-barang dan jasa-jasa umum tertentu, yang diselenggarakan atau disediakan oleh pemerintah yang di biayai dengan hasil pemungutan pajak tersebut. Dalam hal zakat, maka si pembayar zakat tidak dimaksudkan untuk memperoleh manfaat kembali atas pembayarannya itu atau mengharap suatu imbalan bagi keuntungan atau manfaat dirinya dengan membayar zakat itu. Sudah tentu zakat itu akan bermanfaat, namun manfaatnya teruntuk orang lain. Niat dari si pembayar zakat hanyalah untuk beribadat melaksanakan perintah Allah. Kewajiban zakat itu juga hanya dikenakan pada orang-orang yang beriman atau orang-orang Muslim, sedangkan orang-orang bukan-Muslim tidak terkena kewajiban. Padahal, pajak dikenakan pada semua warga negara dengan tak memandang agama.

Kedua, pajak ditentukan berdasarkan tarif tertentu untuk berbagai golongan pajak yang dapat turun naik tergantung dari peraturan yang disusun atas dasar perhitungan rasional-ekonomis. Tarif itu bisa bersifat progresif, proporsional maupun regresif. Sedangkan zakat, pada dasarnya bersifat proporsional dan tak dapat diubah-ubah lagi, apalagi menyimpang dari yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Umpamanya saja, zakat harta atau barang dagangan tidak bisa diturunkan atau dinaikkan persentasenya selain $2\frac{1}{2}\%$ untuk semua golongan pendapatan atau untuk seberapa besar pun nilainya. Sudah tentu masih terdapat kemungkinan perubahan tentang persentase zakat, misalnya dalam zakat pertanian yang bisa berubah dari 10% menjadi 5%, jika umpamanya untuk mengairinya dibutuhkan ongkos-ongkos tambahan yang dapat mengurangi banyaknya hasil bersih. Persentase atau *fraction* zakat rupanya juga berbeda-beda untuk berbagai jenis zakat. Namun, nampaknya berbagai perhitungan analogi hasil ijtihad para ulama pada dasarnya mengarah pada tarif yang proporsional. Umpamanya, untuk 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing (sekitar 2,4%), untuk 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing (juga 2,4%), dan untuk 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing (juga 2,4%). Namun ketentuan itu pada pokoknya tidak bisa diubah-ubah.

Perbedaan pokok ketiga antara zakat dan pajak adalah dalam soal pembelanjaan dan penggunaannya. Banyaknya jenis pajak dan tarifnya ditentukan oleh peraturan-peraturan pe-

merintah atau undang-undang serta dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan perencanaan anggaran pemerintah. Penggunaannya juga diatur dalam suatu anggaran belanja negara berdasarkan rencana kegiatan pemerintahan, perkembangan ekonomi dan pembinaan sosial budaya. Dalam zakat sudah ditentukan siapa yang berhak menerimanya yaitu delapan golongan (*asnaf*) seperti yang tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu "orang-orang paling miskin dan tersisih" atau "distitutes" (*fuqara*), orang-orang miskin (*masakin*), mereka yang melakukan pemungutan dan pembagian zakat itu sendiri (*amilin*), mereka yang baru masuk Islam dan perlu disantuni (*mu'allaf*), para budak yang perlu dimerdekakan dengan tebusan (*riqab*), orang-orang yang lagi menanggung utang yang tak terbebaskan (*gharim*), untuk membiayai perjuangan di jalan Allah (*sabilillah*), dan yang lagi berada dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan (*ibnu sabil*). Hasil pajak sudah tentu tidak bisa diarahkan penggunaannya berdasarkan aturan itu, walaupun sebagian dapat diarahkan misalnya untuk para fakir dan miskin.

3. Arti Ekonomi Zakat

Menurut kesepakatan para ulama, yang menjadi sasaran atau penerima utama zakat adalah fakir miskin. Zakat "diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang-orang yang papa di antara mereka". Dengan istilah ekonomi, maka zakat adalah merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunya. Peng-

alihan kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat itu bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Di sinilah kemudian kita berpikir bahwa zakat, walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

Dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, maka zakat bisa berkembang menjadi konsep *mu'amalat* atau kemasyarakatan, yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apabila kita telusuri riwayat turunnya kewajiban zakat, kita akan menjumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kemasyarakatan, bahkan juga kenegaraan. Surat at-Taubah ayat 60 tersebut di atas yang secara pasti dan terperinci memberikan perihal zakat, memang diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Tapi menurut riwayat lain, zakat itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah pada tahun ke-2 Hijrah, walaupun hanya ditujukan kepada dua kelompok masyarakat saja, yaitu kaum fakir dan kaum miskin. Bahkan diriwayatkan bahwa zakat itu sudah berlaku sejak zaman Makkah, sebelum Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Zakat pada waktu itu ditunaikan karena urusan tolong menolong, walaupun tidak dengan definisi dan ketentuan yang jelas dan tegas. Tapi di situ nampak bahwa zakat memang sangat erat hubungannya dengan perkara *mu'amalat*. Pada tahun

ke-10 Hijrah, ketika Nabi memerintahkan kepada Mu'adz untuk menjadi kepala pengadilan dan wali negeri di Yaman agar menunaikan zakat, maka sebenarnya zakat sudah menjadi urusan pemerintahan. Ketika itu Nabi berkata kepada Mu'adz: "*Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat; yaitu yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.*" Peristiwa inilah kiranya yang dijadikan dasar oleh Khalifah Abu Bakar Shiddiq untuk menilai zakat sebagai kewajiban warga negara yang mengandung sanksi hukum. Zakat bukan saja bisa menimbulkan dosa jika tidak ditunaikan oleh yang terkena kewajiban, melainkan juga bisa mendatangkan hukuman dari negara, sebab harta zakat adalah "hak para fakir dan miskin" yang harus dibayar oleh mereka yang kaya.

Selama ini, dampak sosial-ekonomi dari pelaksanaan zakat belum nampak, kecuali untuk beberapa kasus, yang di situ zakat telah diarahkan sebagai suatu program sosial—tapi ini baru dilakukan dalam skala kecil saja. Padahal, dalam konsepsi, seperti yang selalu ditulis oleh para sarjana Muslim, zakat dimaksudkan sebagai bagian dari suatu sistem yang secara struktural diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan masyarakat. Zakat selalu dikemukakan sebagai suatu konsep *panacea* untuk memberantas kemiskinan. Namun, dalam prakteknya, zakat dilakukan sekadar untuk memenuhi rukun Islam yang keempat, dan karena itu lebih banyak me-

rupakan masalah pribadi, dan dampaknya tidak lebih dari sekadar meringankan beban konsumsi seseorang untuk beberapa hari saja.

4. Zakat sebagai “Kebijaksanaan Ekonomi”

Masalah zakat menarik perhatian banyak pihak karena dirasakan relevan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Kalau kita mempelajari sejarah lahirnya ilmu ekonomi itu sendiri, timbulnya teori-teori dan mazhab-mazhab ekonomi serta perkembangan pemikiran ekonomi, maka kita akan dapat menarik kesimpulan bahwa timbulnya teori-teori ekonomi itu berkaitan erat dengan persoalan-persoalan dan tantangan sosial-politik dari masyarakat yang bersangkutan. Suatu aliran pemikiran bisa berkaitan dengan kebutuhan negara dan pemerintahan atau dilatarbelakangi oleh kepentingan berbagai kelas, lapisan dari kelompok-kelompok sosial. Suatu teori dimaksudkan untuk memberi kerangka analisis untuk menjelaskan realitas berdasarkan seperangkat nilai-nilai tertentu dan mengarah pada tujuan tertentu pula. Oleh karena itu, dalam membahas masalah zakat, kita perlu pula mempelajari mengapa zakat dinilai relevan. Dari sini kita akan dibawa untuk mempelajari latar belakang sosial-ekonomi yang akan menjelaskan mengapa orang berpikir tentang zakat.

Dewasa ini, zakat sangat menonjol dalam pemikiran etis yang dihubungkan dengan masalah-masalah sosial-ekonomi. Berzakat, tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan sebagai ibadat yang

manfaatnya tentuju pada diri sendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandangan kemanusiaan. Berpikir etis yang timbul di dalam masyarakat kaum Muslimin sekarang, disebabkan kaum Muslimin sudah menjadi peka terhadap lingkungan sosialnya. Orang sudah berpikir sosiologis dengan melihat adanya lapisan masyarakat yang miskin yang harus mendapat perhatian dari golongan kaya. Selanjutnya, kaum Muslimin juga telah meningkatkan pendekatan rasionalnya sehingga menimbulkan pemikiran yang lebih teknis, yaitu menghubungkan soal zakat dengan masalah realokasi sumber-sumber ekonomi. Dengan pendekatan etis dan pemikiran rasional-ekonomis itu, orang melihat zakat sebagai semacam “kebijaksanaan ekonomi” yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin.

Dalam menjalankan zakat, baik secara individual maupun secara kolektif, kita harus melandasinya dengan hasil pemikiran yang sungguh-sungguh. Memikirkan zakat secara rasional akan menghasilkan sikap etis. Dengan berpikir etis, kita tidak hanya sekadar menerima norma agama itu begitu saja, melainkan kita memikirkan dan menganalisis perbuatan yang akan kita lakukan itu. Berpikir etis mengenai zakat akan bisa mengakibatkan kita berpikir fungsional. Di situ kita sudah berpikir dalam kerangka subyek-obyek dari perbuatan itu dan melihat arah konvergensinya antara subyek dan obyek serta di antana subyek dan obyek itu sendiri. Dalam berpikir fungsional itu, umpamanya kita memi-

kirkan, bagaimana sebaiknya kita mengatur perbuatan kita itu, secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain, sehingga perbuatan berzakat itu dapat mendatangkan manfaat yang maksimal, misalnya manfaat ekonomi kolektif.

Apabila kita telah berpikir untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya tentang perbuatan berzakat, maka kita sebenarnya telah memasuki alam pemikiran ekonomi dan sistem ekonomi. Berpikir secara ekonomi berarti memikirkan zakat sebagai salah satu di antara sumber-sumber ekonomi yang penggunaannya atau pengolahannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat konsumtif atau produktif yang maksimal atau optimal. Di sini kita dihadapkan pada persoalan memilih di antara berbagai alternatif tindakan atau kebijaksanaan yang konkretisasinya dapat diwujudkan dalam suatu organisasi ekonomi atau sistem ekonomi pada berbagai skala dan ruang lingkup.

Dalam memikirkan soal zakat itu, kita bersikap etis, yaitu dengan secara bersungguhsungguh mencari hikmah zakat dan manfaat zakat bagi kehidupan masyarakat. Di situ kita memikirkan tentang timbulnya dampak sosial yang bermanfaat. Dampak sosial itu umpamanya mengatasi masalah kemiskinan. Dengan begitu, pemikiran ekonomi tertentu dengan sikap etis. Maka terjadilah suatu pemikiran untuk bisa mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih

rasional dan efisien agar dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

5. Zakat dan Sistem Nilai Islam

Nilai etis yang terkandung di dalam zakat sebenarnya tak bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran lain Islam. Dalam sistem nilai Islam, sangat terkenal pengertian-pengertian seperti: *ihsan*, *ta'awun*, *birr*, *amar ma'ruf nahi munkar*, *ukhuwah*, dan sebagainya. Pada pokoknya Islam mengajarkan perbuatan baik kepada sesama manusia, menganjurkan tolong menolong, membebaskan manusia dari perbudakan, menegakkan yang baik dan menegasi yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Zakat, tentu sejalan dengan ajaran-ajaran itu, malah dapat dikatakan secara pasti, merupakan salah satu bentuk konkret bagaimana mencapai nilai-nilai itu. Zakat berkaitan secara langsung dengan ayat 7 Surat al-Hasyr: "*Jangan sampai terjadi bahwa harta kekayaan itu beredar di kalangan kecil orang-orang kaya*" ini berarti bahwa Islam tidak menghendaki adanya kecenderungan konsentrasi kekayaan pada sekelompok elite masyarakat. Tak ayal lagi, zakat dimasukkan untuk mencegah terjadinya proses konsentrasi kekayaan itu.

Demikianlah, maka pengelolaan zakat dapat diorientasikan kepada nilai-nilai Islam yang lebih luas itu. Dalam Surat al-Baqarah ayat 177, dijelaskan hubungan antara konsep *birr* dengan salat dan zakat. Konsep itu menyangkut sikap iman (kepada Allah dan hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi), juga tindakan-tindakan konkret yang menyangkut hubungan dengan sesa-

ma manusia (memberikan harta dengan sukahati kepada kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perantauan atau mengalami kesulitan dalam perjalanan, kepada orang yang membutuhkan dan kepada budak agar dapat membebaskan dirinya). Mendirikan salat dan berzakat juga termasuk dalam konsep *birr* itu, bahkan juga berbagai sikap yang terpuji seperti menepati janji dan bersikap sabar dalam keadaan susah. Sedikit-tidaknya, beberapa pengertian dalam konsep *birr* itu dapat dijadikan titik orientasi dalam pelaksanaan zakat.

Konsep lain yang terdapat dalam al-Qur'an adalah mengenal *aqabah* yang dapat diterjemahkan sebagai *the great ascent* untuk memiripkan istilah ekonom Robert Heilbroner, atau "pendakian yang tinggi". Yang dimaksud adalah suatu upaya yang mengandung tantangan berat seperti umpamanya: memerdekakan budak (atau pembebasan dari perbudakan); memberi makan di hari kelaparan, memelihara anak-anak yatim, serta menolong fakir miskin yang terhampar dalam kehinaan.² Antara konsep "aqabah", "birr" dan "zakat" terdapat titik-titik persamaan. Tindakan berzakat perlu dilandasi dengan semangat *birr* yaitu "*kamu tidak akan mendapatkan nilai kebajikan (birr) sehingga kamu membelanjakan dari apa saja yang kamu cinta*" (Surat Al-Imran, ayat 92). Demikian pula suatu tindakan individual atau kolektif (termasuk kebijaksanaan ekonomi) untuk merealisasikan *aqabah*, da-

² Lihat Surat al-Balad.

pat dilakukan dengan zakat yang dilandasi oleh motivasi *birr*. Dengan begitu, maka zakat beroleh makna etis-sosial yang luas yang mencakup segi keyakinan, sikap yang tepat dan etis dan bentuk tindakan yang konkret serta jelas tujuannya.

6. Zakat: Strategi Baru Pembangunan

Dalam gagasan strategi pembangunan yang baru, yang disebut "*Basic Strategy*" timbul gagasan untuk melakukan sesuatu yang disebut "pengalihan konsumsi" (*transfer of consumption*), "pengalihan pendapatan" (*transfer of income*), "pengalihan kekayaan" (*transfer of wealth*), "pengalihan investasi" (*transfer of invest*) atau pun "pembagian kembali kekuasaan" (*redistribution of powers*). Maksudnya adalah bahwa hendaknya program-program pembangunan itu ditujukan dan dapat diambil manfaatnya secara langsung oleh golongan yang paling miskin dan paling lemah. Juga dimaksudkan agar golongan yang kaya dan kuat dikurangi kekuatannya secara relatif, dengan meningkatkan kemampuan dan kekuasaan lapisan yang paling miskin. Di sini pengalihan kemampuan dan kekuasaan berjalan seiring dengan pengalihan kekayaan, pendapatan, konsumsi dan investasi.

Zakat, dalam hal ini jika dikembangkan konsepsinya berhadapan dengan kenyataan-kenyataan dan persoalan-persoalan empiris, akan nampak relevansinya dengan strategi pembangunan baru itu. Sistem zakat bersifat langsung. Sebagai "pajak", zakat merupakan "pajak langsung", yaitu dikenakan langsung pada si

wajib zakat. Si penerimanya (*bonaficieries*) juga langsung. Karena itu penyelenggaraannya juga dituntut agar dapat menyampaikan zakat secara langsung. Bahkan juga tidak saja langsung, tetapi juga diberikan kepada individu-individu.

Sayid Muhammad Rasyid Ridha membuat penggolongan yang menarik tentang *asnaf* yang delapan. Dan delapan *asnaf* itu, ia membagi menjadi dua kelompok: pertama, penerima individual yaitu *fuqara*, *masakin/mualaf*, *amilin gharimin* dan *ibnus sabil*. Kedua, kelompok umum yang bersifat kolektif, impersonal atau struktural, yaitu yang bisa dikategorikan *fir riqab* (dalam keadaan diperbudak atau dijajah) dan yang dalam keadaan berjuang *fi sabilillah*. Sebenarnya pada kelompok pertama, khususnya yang menyangkut *fuqara wa masakin*, zakat bisa disampaikan secara struktural. Yang penting adalah bahwa uang atau barang yang berupa zakat itu benar-benar bisa dinikmati secara langsung. Hal inilah yang menimbulkan keunggulan dalam sistem zakat dibanding dengan sistem pajak yang dibelanjakan melalui anggaran dan program yang sifatnya sektoral maupun regional. Sungguhpun demikian, suatu kebijaksanaan atau rencana yang sifatnya sektoral maupun regional dapat pula dipakai untuk membantu efektifitas zakat. Mu'adz misalnya, pernah mengirimkan sepertiga hasil zakat kepada Khalifah Umar di Madinah. Khalifah menolak, karena menurut pendapatnya zakat yang dikumpulkan di suatu tempat adalah menjadi hak orang-orang di tempat pemungutan itu. Tapi Mu'adz menjelaskan: "*Saya tidak akan mengirimkan*

sesuatu kepada Khalifah sekiranya masih ada orang yang berhak menerimanya daripadaku" Jadi kemanfaatan lokal sangat diperhatikan dalam sistem zakat ini, namun dimungkinkan juga pengalihan zakat dari satu daerah ke daerah yang lain, asalkan tidak mengurangi hak masyarakat setempat.

Karena itu, zakat memiliki kesempatan terbuka bagi suatu program pemberantasan kemiskinan dan perbudakan secara efektif. Zakat perlu dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang paling relevan, misalnya tentang doktrin yang menghendaki jangan sampai terjadi konsentrasi kekayaan dan peredaran yang melingkar di sekitar golongan elite, juga hadits Nabi saw yang menjelaskan fungsi zakat, yaitu mengalihkan kekayaan dari kelompok kaya ke golongan miskin. Ini berkaitan juga dengan ayat yang memerintahkan *ta'awun* (kerja sama dalam kebaikan), *fakkuraqabah* (membebaskan orang dari perbudakan), *birr* (berbuat kebajikan umum) *ihsan* (memperbaiki dan membaikkkan sesuatu), *ta'amil miskin* (memberi kesempatan kepada orang-orang miskin untuk melakukan konsumsi terhadap kebutuhan yang paling dasar), dan sebagainya. Masalahnya adalah, bagaimana menyelenggarakan zakat secara lebih efektif dan efisien.

D. Nilai-nilai Sosial dalam Zakat Fitrah

Menurut Prof. Ibrahim Husen, hasil suatu pemahaman terhadap sumber ajaran Islam,

yang kemudian lebih dikenal dengan istilah Fiqh, seringkali dilakukan melalui pendekatan *ta'abudi*, yaitu menerima dan menafsirkan ajaran dengan apa adanya. Karenanya kausalitas hukum dan hikmah hukum itu tidak banyak terungkap. Bahkan pikiran menjadi tumpul karena lebih mengandalkan ketaatan daripada rasio. Padahal suatu *fiqh* tidak hanya diperoleh melalui pendekatan *ta'abudi* saja, melainkan juga bisa dengan *ta'aquli*, yaitu pendekatan rasional. Manfaat menggunakan pendekatan *ta'aquli* ini, kausalitas hukum dan hikmah hukum dapat dimengerti secara luas, dan penerapan teori ini biasanya sering digunakan para pakar hukum Islam dalam membahas masalah-masalah kemasyarakatan.

Salah satu dari teori *ta'aquli* ini adalah metode *qiyas*, yaitu analogi untuk memecahkan masalah-masalah yang baru yang belum ditegaskan oleh al-Qur'an dan Hadits, dengan menempuh suatu cara yaitu dengan merumuskan kaidah-kaidah yang ada dan pengujian terhadap kausalitas yang benar-benar baru. Sehingga kesimpulan-kesimpulannya terkadang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, antara konsep dahulu dengan sekarang.

Pendekatan di atas, bila dipakai dalam membicarakan zakat fitrah, dengan pengkajian terhadap fakta-fakta yang ada, tampaknya akan menarik perhatian banyak pihak, karena pemikiran di sekitar zakat fitrah, terutama segi praktiknya, dianggap sudah final sebagaimana dalam kenyataan sekarang, bahwa zakat fitrah su-

dah dipandang sebagai ajaran Islam yang tidak perlu lagi dipersoalkan, apalagi dikaji ulang. Hal ini tampaknya telah dianut oleh umat seantero dunia Islam, atau berlaku final itu hanya di Indonesia saja?

Akan tetapi meski demikian, zakat fitrah tetap perlu dibicarakan, karena zakat fitrah merupakan asset umat Islam yang setiap setahun sekali dikeluarkan untuk mengatasi kemiskinan, di samping sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, baik yang sudah dewasa maupun masih kanak-kanak, bahkan satu pendapat mengatakan bahwa bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya bila telah berumur empat bulan ke atas mesti dikeluarkan zakat fitrahnya oleh kedua orang tuanya yang mampu. Karena itu, berzakat dengan tiga setengah liter atau dua setengah kilogram beras yang diukur dari satu *sha'*, yaitu ukuran tempo dulu zaman Rasul, dinyatakan sebagai ibadah *maliyah*, yang berdampak positif dalam mengatasi kelemahan ekonomi masyarakat.

Yang perlu dipersoalkan di sini adalah praktik Nabi dalam berzakat yang tampaknya tidak sepenuhnya diikuti, seperti berzakat dengan 3,5 liter beras perorang. Hal itu merupakan hasil pemahaman terhadap petunjuk Nabi dan sekaligus berindikasikan *ijtihad*, dan hasil *ijtihad* yang dipraktikkan oleh umat sekarang ini sepertinya dianggap sudah final, tak bisa diganggu gugat lagi.

Oleh karena itu berzakat fitrah dengan 3,5 liter beras itu, sudahkah dianggap adil bagi semua lapisan tingkat perekonomian umat Islam? Apakah jumlah tersebut tidak menjadi terlalu ringan bagi yang berkecukupan dan biasa berkonsumsi mewah? Sementara pemahaman segi berzakat dengan 3,5 liter beras itu adalah merupakan *qiyasi*/analogi atau *ijtihad* dari petunjuk Rasul. Namun kenapa menjadi dianggap berlaku final? Bukankah *ijtihad* itu selalu berkonotasi menerima pembaruan?

Kemungkinan-kemungkinan untuk diadakan pembaruan pemikiran tentang konsep zakat fitrah ini adalah dari praktik Rasul dalam berzakat fitrah yang ditegaskan dengan kedua jenis makanan yaitu kurma dan gandum. Bahkan gandum sebagai pengganti dari kurma. Hal ini dapat dipahami dari sabda Nabi dalam kalimat: "*Sha'an min tamarin aw min syari'rin*, satu *sha'* dari kurma atau gandum".

Dari sini timbul pemikiran, mengapa Nabi hanya menyebut dengan tegas yaitu *tamar* (kurma) dan *sya'ir* (gandum) saja? Dan apakah Nabi tidak mengenal jenis makanan lain yang dikonsumsi masyarakat Arab tempo dulu, selain kedua jenis makanan tadi? Hal ini perlu diperjelas, karena akan menjadi sandaran analogi bagi masyarakat yang berbeda tradisi dan budayanya dengan negeri Arab zaman Rasul. Bahkan yang sudah berlaku di masyarakat kita adalah berzakat fitrah dengan beras itu merupakan analogi dari gandum. Padahal Rasul menegaskan, sebagaimana telah dinyatakan di atas, yaitu bahwa

Rasul berzakat fitrah dengan satu *sha'* dari kurma atau dari gandum. Yang dipertanyakan di sini, kenapa yang menjadi dasar ukuran analogi itu hanya dari gandum saja, tidak dari kurma juga? Apakah karena gandum mengandung unsur mengenyangkan (*qut*) sementara kurma tidak? Padahal kurma yang terlebih dahulu disebutkan Nabi, sebagaimana tertulis dalam teks Hadits di atas.

Lagi pula antara kurma dengan gandum bila dibanding segi kualitas dan harganya, kurma jauh lebih baik. Bahkan memakan kurma tidak perlu disertai dengan makanan pendamping lainnya selain air, hal ini berbeda dengan gandum, yang perlu disertai dengan makanan pendamping seperti sayuran, lauk pauk dan lain-lain. Dengan kata lain, berzakat dengan ukuran kurma dengan sendirinya mencakup pemberian seluruh makanan penyerta lainnya.

Dengan demikian berzakat dengan beras sebagai analogi dari gandum itu, tampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut, karena masih diperlukan makanan pendamping lainnya bagi yang menerimanya. Dan berzakat fitrah itu ukurannya bukan dilihat dari jenis makanan pokok atau bukan, akan tetapi makanan yang lebih layak dikonsumsi, yang tentunya mengandung berbagai unsur kepentingan konsumsi, seperti tercermin dari jenis makanan kurma.

Dalam hal ini, Dr. H. Jaluluddin Rahman, dari IAIN Palembang memandang lebih jauh bahwa berzakat fitrah dengan memakai ukuran tempo dulu, yang salah satunya adalah dengan

kurma itu, hasilnya akan berbeda dengan memakai beras yang diukurkan kepada gandum. Karena harga kurma lebih tinggi dibanding harga beras atau gandum. Misalnya harga kurma di pasar Arab (Madinah), 10-70 Rs/kg. Sedangkan nilai tukar Real kepada Rupiah diperkirakan adalah Rp. 400. Sedangkan ukuran satu *sha'* itu sama dengan 2,5 kg, maka bila berzakat fitrah dengan memakai tolok ukur harga kurma yang paling rendah adalah $10 \text{ Rs} \times \text{Rp. } 450 \times 2,5 \text{ kg} = \text{Rp. } 11.250/\text{orang}$. Sedangkan berzakat fitrah dengan memakai tolok ukur beras yang dianalogikan kepada gandum itu, yang diketahui harga beras saat ini adalah 900/kg, maka berzakat fitrah dengan beras adalah $900 \times 2,5 \text{ kg} = \text{Rp. } 2.250$.

Perhitungan di atas tentunya relatif, bahkan mungkin lebih besar lagi. Namun demikian, berzakat fitrah dengan memakai tolok ukur kurma sebagaimana yang diisyaratkan oleh petunjuk Hadits di atas, nilainya akan lain dan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan memakai tolok ukur gandum. Hal ini barangkali lebih mencontoh sikap Rasul dalam mengeluarkan zakat fitrah. Dengan pendekatan ini, maka moralitas sosial dalam berzakat fitrah lebih tampak ke permukaan, dibanding berzakat fitrah dengan memakai tolok ukur gandum atau beras seperti yang berlaku hingga sekarang ini.

Maka berdasarkan perbandingan-perbandingan di atas, praktik berzakat fitrah yang selama ini berlaku, tampaknya memerlukan pengkajian ulang, terutama dengan penetapan 3,5

liter beras/orang. Karena hal ini terlalu minimal bila dibandingkan dengan praktik Rasul berzakat fitrah. Bahkan Rasul pernah berzakat fitrah dengan segantang kurma, yang bila dikilokan bisa mencapai 3,5 kg, dan kurma sebanyak itu cukup untuk konsumsi seseorang selama 3 hari waktu itu, dan makan kurma cukup ditemani oleh air.

Lagi pula mengeluarkan zakat fitrah itu di samping merupakan sebagai pemenuhan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, juga mengeluarkan zakat fitrah yang setahun sekali itu merupakan cermin perwujudan dari rasa persaudaraan dan kebersamaan umat Islam. Karena itu, mengapa para ulama di Indonesia mengambil tolok ukur zakat fitrah itu kepada yang minimal, yaitu mengukur kepada gandum, bukan kepada yang maksimal, yaitu kurma?

E. Pengembangan Harta Benda WaKaf: Menyambut UU No. 41 Th. 2004.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian baru diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI pada tahun 2005 ini, tampak mengembirakan sekaligus memprihatinkan. Mengapa? Di satu sisi kehadiran undang-undang tersebut jelas membawa berkah bagi umat Islam. Karena di situ harta yang boleh diwakafkan tidak lagi berupa benda tak bergerak,

seperti tanah dan bangunan sebagaimana yang berlaku selama ini, melainkan boleh harta apa saja yang memungkinkan bernilai material yang diperlukan bagi pemberdayaan umat, seperti uang, deposito atau surat berharga lainnya, yang waktu pewakafannya dapat pula dibatasi sesuai dengan kemampuan muwakif.

Munculnya undang-undang tersebut jelas memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Padahal Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Bandingkan misalnya dengan di negara-negara Timur Tengah atau negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim di negara-negara di Asia, penanganan wakaf terhitung lebih baik. Di Mesir, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, wakaf bahkan dikelola oleh departemen khusus bernama "Kementerian Wakaf dan Urusan Islam" (*Wazarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyat*). Kata "Wakaf" eksplisit disebutkan pada nama kementerian. Tidak demikian dengan persoalan penanganan zakat, meski hukum zakat wajib dan hukum wakaf sunnah. Itu merupakan tanda bagi tingginya perhatian negara pada pengelolaan wakaf. Kondisi inilah yang penulis maksudkan dengan kata memprihatinkan tersebut.

Potensi wakaf sebagai sumber pemberdayaan umat, tampak harus berkiblat pada cerita sukses wakaf Universitas al-Azhar, Kairo, yang hampir menjadi legenda bagi siapa pun yang hendak menunjukkan bukti kekuatan wakaf bagi perekonomian umat Islam. Negara Mesir sendiri pernah pinjam anggaran pada wakaf al-

Azhar. Karena nilai anggaran belanja al-Azhar lebih besar dari anggaran negara Mesir. Bahkan dengan kekuatan harta wakaf itu al-Azhar pernah menjadi kekuatan *civil society* yang amat independen terhadap negara. Hingga akhirnya, Presiden Gamal Abdul Nasser melakukan nasionalisasi paksa atas seluruh harta wakaf al-Azhar. Kongsesinya, al-Azhar dijadikan bagian struktur negara, dan Syaikh al-Azhar dijadikan pejabat setingkat perdana menteri dan digaji pemerintah. Konon katanya, menurut Azyumardi Azra, dari UIJN Jakarta, sejak itu al-Azhar telah dikooptasi dan menjadi bagian negara.

Persoalan penafsiran bahwa harta wakaf itu tidak hanya harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat dipergunakan tidak hanya sebagai sarana ibadah semata, lagi-lagi umat Islam Indonesia telah jauh tertinggal. Jauh-jauh hari di Arab Saudi, tanah wakaf di sekitar Masjid al-Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah, sudah dikembangkan untuk usaha produktif. Hotel berbintang dan pertokoan dibangun di atas tanah wakaf, yang hasilnya untuk kepentingan pemeliharaan kedua masjid tersebut. Bahkan di Bangladesh, para ulamanya pada tahun 1995 telah memprakarsai wakaf tunai berupa uang. Demikian seperti dilaporkan oleh Gatra, 19 Februari 2005.

Terlepas atas terlambatnya kemunculan undang-undang tentang wakaf tersebut di Indonesia, yang isinya berupa paradigma baru tentang wakaf itu, yang menjadi catatan penulis

di sini adalah tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut seperti tercantum dalam bab V (2005: 21) undang-undang tersebut. Di mana pada bab tersebut undang-undang yang berisi pasal 42 hingga 46 itu menurut penulis mengandung kerawanan, yang dalam bahasa penulis jangan sampai menjadi sarang baru bagi para koruptor. Mengapa? Karena sekalipun pada bab itu diisyaratkan bahwa penanganan bagi harta benda wakaf itu harus dengan Peraturan Pemerintah (pasal 46), maka yang terbayang dalam penanganan harta benda wakaf itu adalah para PNS yang berada di Departemen Agama seperti Nazhir dan para stafnya.

Peraturan Pemerintah yang diharapkan bagi personal yang bertugas mengelola harta benda wakaf dalam peraturan itu yang terpenting menurut penulis antara lain:

1. Bagi para calon nazhir dan para stafnya, tidak terbatas pada PNS saja, melainkan pada reputasi orang yang dikenal jujur, bersih dan amanat. Artinya, para calon itu dapat diajukan oleh masyarakat di mana harta benda wakaf itu berada.
2. Bagi para calon nazhir dan para stafnya, yang memiliki naluri intelektual yang mampu memberdayakan umat.
3. Pengajuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf bagi kemajuan masyarakat, harus atas usulan masyarakat di mana harta benda wakaf itu berada.

4. Dalam upaya transparansi dan bertanggung jawab, maka pelaporan pengelolaan harta benda wakaf, masyarakat setempat perlu dilibatkan.
5. Masa jabatan nazhir dan stafnya perlu dibatasi selama 2 tahun misalnya, agar peluang korupsi tidak terlalu menganga lebar.

Bagian Kelima: **PENUTUP**

Dari paparan pada bagian-bagian terdahulu dalam buku ini jelas bahwa di antara pesan al-Qur'an yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, adalah terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, yang tidak menumbuhkan kecemburuan yang semakin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin. Inilah pesan ajaran Islam yang pernah mendapat prioritas pembinaan umat ketika Nabi Muhammad pertama kali membina masyarakat di sekitar kota Madinah.

Umat Islam Indonesia yang merupakan komunitas terbesar di negeri ini hanya akan hidup layak dan sebagai umat pilihan, jika memiliki kualitas tinggi sehingga sanggup menyelesaikan persoalannya sendiri. Allah SWT mengingatkan, bahwa perubahan suatu kaum itu hanya akan terjadi bila kaum itu sendiri yang mau berbuat untuk kepentingan perubahan yang mereka inginkan.

Dalam konteks pemberdayaan, perubahan itu biasa juga disebut kemajuan dan modernisasi. Sebab perubahan yang diharapkan dalam pemberdayaan adalah perubahan positif yang bergerak menuju kemajuan dan kemodernan dalam berbagai lapangan kehidupan umat manusia. Itulah sebabnya, dalam perspektif sosiologis, kata modernisasi biasa digunakan untuk melukiskan suatu perubahan struktur masya-

rakat yang terjadi karena proses industrialisasi. Perubahan itu muncul pada fenomena kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, yang pada gilirannya ia bisa menghasilkan struktur masyarakat baru dengan segala kaidah-kaidah kemoneteraan yang melekat padanya.

Dalam aspek ekonomi, modernisasi dapat pula diartikan sebagai proses aplikasi teknologi baru untuk mendapatkan tingkat produktifitas yang tinggi. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, proses modernisasi dalam bidang ekonomi ini seringkali berhadapan dengan tantangan baru berkaitan dengan kesiapan sumberdaya manusia yang dimilikinya. Sebab industrialisasi yang menjadi ciri modernisasi ekonomi pada umumnya dimulai dengan upaya mekanisasi perangkat pertanian. Sejumlah perlengkapan modern dibuat atau didatangkan untuk memenuhi kebutuhan, sekaligus menggeser peran-peran tenaga tradisional. Resikonya, sistem aplikasi tenaga mesin ini tentu saja bisa menurunkan jumlah tenaga manusia sebagai salah satu sumber lapangan kerja. Namun penyempitan lapangan kerja demikian, dalam kondisi yang seperti itu, sesungguhnya tidak merugikan, karena penggunaan SDM menjadi hemat.

Dalam situasi sosial seperti digambarkan di atas, lalu peran ekonomi apa kira-kira yang dapat dimainkan umat Islam saat ini? Potensi apa yang dimiliki umat yang dapat mendukung peranan itu? Bagaimana sistem pemanfaatan potensi itu bila akan kita dayagunakan untuk

kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu melihat ulang potensi dasar umat Islam. Di samping memiliki potensi mayoritas, umat Islam juga memiliki potensi kekayaan yang cukup besar. Di antara indikator yang gampang dilihat, misalnya, kemampuan umat dalam memenuhi persyaratan biaya naik haji. Jumlah jemaah haji tiap tahun terus meningkat. Bahkan banyak di antaranya yang sudah mampu menunaikan ibadah haji lebih dari satu atau dua kali.

Sudah barang tentu bahwa fenomena tersebut bukan hanya merupakan ukuran besar-kecilnya kekayaan yang dimiliki, tetapi juga merupakan ukuran tinggi-rendahnya kesadaran beragama umat yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Justru faktor kesadaran ini pula yang perlu kita perhitungkan pada saat kita akan memikirkan nasib ekonomi umat secara umum. Sebab problema kesejahteraan ekonomi ini juga berakar kuat pada ajaran Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kita. Bukankah Islam itu merupakan agama yang meletakkan dasar kehidupan manusia di atas prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan ganda itu, agama menganjurkan para pemeluknya agar terus melaksanakan ajaran spiritual di satu sisi, dan jangan melupakan untuk memenuhi kebutuhan material di sisi lain.

Di antara ajaran Islam yang memiliki dimensi ganda spiritual dan material adalah ajaran zakat. Ajaran ini pula berdimensi sosial, yang berarti bahwa pemenuhan kebutuhan material, bukan hanya berorientasi pada situasi individual tetapi juga sosial. Dalam kerangka inilah prinsip zakat menjadi alternatif dalam membangun kekuatan ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas dengan sesama manusia.

Akan tetapi, pada prakteknya, membangun ekonomi umat lewat zakat itu tidak segampang seperti apa yang dibayangkan. Dalam pelaksanaan kewajiban zakat itu masih ada masalah. Dikatakan masih ada masalah, sebab kita masih sering mendapatkan kesulitan ketika memilih zakat sebagai alternatif membangun situasi ekonomi umat. Tetapi di mana sesungguhnya letaknya masalah itu, tidak gampang untuk dijelaskan bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib, tentu saja sudah tidak ada lagi masalah. Sepanjang yang di ketahui, tidak ada satu ulama pun yang menganggap bahwa zakat itu tidak wajib. Tetapi apa, berapa, dan bagaimana zakat itu dilakukan, para ulama masih mungkin berbeda pendapat.

Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, dapat dilihat adanya dua tingkat permasalahan. Pertama, pada tingkat pelaksanaan zakat, dan kedua pada tingkat pendayagunaannya. Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah akan banyak melibatkan alim ulama dan para fuqaha. Umpamanya, dalam kaitan dengan kewajiban membayar zakat

bagi para pekerja profesional, yang tidak bertani ataupun berdagang, tetapi bisa memperoleh kekayaan yang lebih besar. Sebut saja zakat itu sebagai zakat profesi, seperti pernah muncul ke permukaan menjadi bahan diskusi para ulama dan fuqaha.

Bentuk zakat seperti itu mungkin tidak terdapat dalam rumusan-rumusan fiqh Islam yang sudah disusun oleh para ulama dan ahli fiqh terdahulu. hal ini bisa dimengerti, sebab pada saat fiqh itu dirumuskan, penulis kira, belum ada pekerjaan-pekerjaan profesional seperti yang kita saksikan saat ini. Ketika para ulama menetapkan rumusan persentase zakat harta (zakat *maal*) sebesar 2,5 persen berdasarkan beberapa Hadits, jelas belum muncul pelbagai profesi modern seperti yang kita lihat sekarang ini. Al-Qur'an juga berulang kali menganjurkan umat Islam agar membayar zakat, tetapi persentasenya tidak disinggung secara jelas oleh al-Qur'an.

Akan tetapi, sepanjang yang penulis ketahui, ajaran-ajaran Islam itu bersifat dinamis dan selalu responsif terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Oleh karenanya rumusan fiqh itu tidak harus mandeg. Sebab fiqh merupakan produk pemikiran tentang suatu ajaran yang dirumuskan sebagai respon terhadap kondisi sosialnya. Lebih-lebih karena Islam sendiri merupakan agama wahyu untuk umat manusia sepanjang zaman, maka niscaya ia punya potensi untuk selalu dinamis, responsif serta mampu memecahkan segala masalah manusia.

Pada tingkat pendayagunaan, seperti penulis sebutkan di atas, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat Islam masih sangat terbatas, mungkin tidak pernah ada masalah dalam mendayagunakan zakat itu. Tetapi sekarang, ketika zakat sudah mencapai jumlah angka yang cukup besar, lalu muncul permasalahan baru. Di Jakarta saja misalnya, potensi zakat fitrah sudah mencapai milyaran rupiah pada setiap tahunnya. belum lagi dari zakat *maal* yang sudah pasti bisa jauh lebih besar yang sampai saat ini masih belum berjalan dengan lancar seperti halnya pelaksanaan zakat fitrah. Ditambah lagi shadaqah yang juga tidak kalah besarnya, yang pelaksanaannya juga kini mulai terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran umat.

Semuanya itu menggambarkan secara sederhana betapa besarnya potensi ekonomi umat Islam. Hal ini memerlukan peningkatan upaya pengelolaan secara lebih baik, lebih profesional, dan lebih berdaya guna bagi kepentingan umat. Jika pada mulanya zakat itu diberikan langsung kepada para pemilik haknya secara individual, apakah cara-cara seperti itu masih dianggap baik untuk diterapkan pada masyarakat yang kini memiliki permasalahan sosial yang semakin kompleks. Jika pada zaman Nabi dan para shahabatnya zakat merupakan lembaga negara dengan membentuk "*baitul maal*" sebagai lembaga pengumpul dan pengatur zakat, apakah untuk kondisi sosial seperti yang kita miliki sekarang ini dapat menggunakan pola yang kurang lebih sama.

Atas semua permasalahan itu, penulis kira, perlu dikembangkan pemikiran baru tentang pengelolaan kekayaan umat yang cukup besar itu. Untuk memikirkan dua tingkat permasalahan seperti penulis uraikan di atas, maka diperlukan kerja sama antara ulama dengan para ahli manajemen ekonomi. Sehingga diharapkan pada masa yang akan datang potensi kekayaan umat yang cukup besar itu dapat menjadi salah satu sumber bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Karena pengelolaan zakat langsung oleh lembaga-lembaga negara, seperti halnya oleh Departemen Agama maupun oleh Pemda seperti halnya za-kat fitrah, sering tidak jelas pemanfaatannya seperti yang berlangsung hingga sekarang.

Munculnya fenomena keuangan syari'ah khususnya di negeri ini, hal ini cukup menggembirakan, yaitu tumbuhnya secara positif dan konstruktif lembaga-lembaga perekonomian umat yang didasarkan pada keyakinan ajaran agama Islam. Hal ini dikatakan sebagai fenomena yang menggembirakan, sebab ia merupakan terobosan baru dalam upaya menyelesaikan masalah masyarakat yang telah lama menjadi agenda pemikiran bersama.

Hampir di seluruh daerah di Indonesia misalnya, telah berdiri lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk bank-bank syariah yang tumbuh atas dasar kesadaran masyarakat akan pentingnya lembaga tersebut. Perkembangan dunia perbankan memang dirasakan begitu cepatnya, sehingga pada sisi tertentu telah memberikan se-

mangat baru bagi tumbuhnya bank-bank syariah. Karena itu, perkembangan lembaga bank syariah ini antara lain juga dipengaruhi oleh adanya pertemuan dua tuntutan yang berbeda, antara kehendak melaksanakan ajaran agama dengan semangat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Di sisi lain, akibat desakan modernisasi dan urbanisasi, pola hidup masyarakat juga terus berubah. Kita dapat secara sederhana menyaksikan berbagai pergeseran sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Termasuk salah satunya pergeseran ke arah yang lebih positif tentang pemanfaatan jasa dunia perbankan, sebab tanpa adanya partisipasi masyarakat seperti itu, perkembangan lembaga keuangan syariah, tampaknya tidak akan terjadi begitu saja.

Lebih-lebih dalam kurun di mana masyarakat Indonesia kini sedang menghadapi era globalisasi dunia perekonomian. Maka usaha-usaha mengantisipasi perkembangan tersebut menjadi sesuatu yang harus terjadi. Sebab bila tidak demikian, masyarakat akan terpinggirkan oleh desakan arus yang tidak mudah lagi untuk bisa dibendung. Oleh karena itu, satu-satunya usaha yang masih mungkin dapat dilakukan adalah mempersiapkan diri dalam menghadapinya, bukan malah sebaliknya berusaha membendungnya.

Era globalisasi yang saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bukan saja terjadi pada dunia informasi dan komunikasi seperti banyak dibicarakan, akan tetapi terjadi dalam

berbagai bidang kehidupan, termasuk dunia perekonomian. Karena itu, dalam percaturan perekonomian, masyarakat tidak bisa lagi membendung tumbuhnya pengusaha luar yang bergerak di lingkungan kita sendiri. Sebaliknya, kita juga dapat secara bebas dan terbuka ikut bersaing di dunia usaha dan perbankan secara global.

Di sinilah seharusnya diletakkan keunggulan ajaran Islam. Islam tidak pernah membatasi para penganutnya untuk bertahan pada posisi pinggiran ketika dunia memang sudah menghendaki untuk ikut terlibat di tengah-tengah arus globalisasi. Hanya saja, Islam senantiasa memberikan rambu-rambu bagi para penganutnya, agar kegiatannya tidak terjebak dalam suasana yang tanpa etika, apalagi bila terkesan saling menindas.

Tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan syariah ini dapat pula dilihat sebagai salah satu bentuk respon Islam terhadap perkembangan sosial masyarakatnya. Dalam konteks seperti ini, Islam dapat dipandang sebagai agama yang senantiasa mampu mempribumi di tanah sendiri dan di saat manapun. Sehingga kekuatan ini pula yang mendorong semangat dalam memberikan respon terhadap berbagai perkembangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Untuk menyiasatinya, diperlukan usaha-usaha yang bukan sekedar penataan di tingkat pelaksanaannya, tetapi juga pada tingkat perumusan hukumnya melalui pintu ijtihad. Terbu-

kanya pintu ijtihad di kalangan para ulama dan cendekiawan muslim, memiliki arti penting bagi perkembangan sosial yang lebih konstruktif. Sebab masalah-masalah sosial yang seringkali terkesan bertubrukan dengan kehendak syariah, akhirnya dapat diselesaikan secara baik, sesuai dengan ukuran kemaslahatan umat.

Karena itulah, diskusi-diskusi atau seminar-seminar yang mengarah pada pembahasan yang lebih spesifik tentang masalah ekonomi syariah tersebut, tampaknya perlu diselenggarakan secara terbuka dan terus berkesinambungan dengan keterlibatan berbagai pakarnya. Hal ini merupakan wahana pembuka pintu baru dalam meningkatkan usaha perbaikan nasib perekonomian umat Islam, yang dalam beberapa dasawarsa terakhir ini banyak yang melihatnya sebagai fenomena yang memprihatinkan. Perbaikan umat ini memang hanya bisa dilakukan oleh kemauan umat Islam itu sendiri. Bukankah Allah sendiri menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum itu sendiri tidak mau melakukan perubahan bagi dirinya.

Maka melalui media-media demikian, diharapkan dapat melahirkan beberapa konsep dan gagasan tentang prinsip-prinsip keuangan syariah berikut aktualisasinya. Sehingga pada taraf oprasionalnya, misalnya dalam perbankan Islam, tidak terjadi perbenturan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan prinsip-prinsip perbankan tersebut. Karena bagaimanapun adanya, prinsip-prinsip perbankan Islam yang masih baru

itu seringkali mengacu pada prinsip perbankan yang bersifat konvensional dan berlatar belakang riba yang diharamkan. Sebagai perbandingan misalnya, dalam perbankan Islam tidak dikenal istilah riba, sementara dalam bank konvensional justru sebaliknya. Namun dalam praktik pinjam meminjam, di BMI misalnya, peminjam dikenakan biaya administrasi, yang dalam jumlahnya terkadang melebihi jumlah bunga dalam bank konvensional.

Penulis kira, persoalan-persoalan inilah barangkali yang perlu diselesaikan secara arif oleh para pemegang kebijakan keuangan syariah, terutama pengawas produk perbankan Islam untuk bisa menjawab tantangan ini, sehingga *image* perbankan Islam itu tetap positif di mata umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- A. Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 23.
- A.M. Saefuddin, makala: "Aktualisasi Da'wah Islam dalam Konstelasi Politik Islam", pada *Seminar Ormas Islam & Tantangan Perubahan Politik di Indonesia Menjelang Abd XXI*, Bandung, 14 Januari 1996.
- , "Nilai-nilai Ekonomi Islam," dalam: *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Badri Khaeruman: *Islam dan Pemberdayaan Umat*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Donny Irawan, artikel: *SEZ dalam Pradigma Ekonomi Islam*, dalam http://batampos.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=762&I
- Hidayatullah Muttaqin, *Pertumbuhan Ekonomi tidak Mampu Mengatasi Kemiskinan*, 20/10/2003, www.e-Syariah.ORG.
- Habib Nazir dan M. Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2004..
- Harian Umum: *Suara Pembaharuan*, 20 Maret 2006.

- Harian Umum: *Pikiran Rakyat*, edisi Jum'at, 25 Februari 2005.
- Harian Umum: *Pikiran Rakyat*, Jum'at 14 Oktober 2005.
- Harian Umum: Kompas, Edisi Sabtu, 19 Agustus 2006.
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995.
- Khursid Ahmad, "Pengantar" buku Bank Islam, M. Nejatullah Siddiqi Th. 1982.
- Majalah Bulanan Risalah, Juni 1992.
- M. Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in the Economy* (Lancaster The Islamic Foundation, 1979).
- M.A. Mannan, "Islamic Economics as a Social Science" dalam *Journal of Research in Islamic Economics*, vol. I, Summer 1983.
- M. Quraissy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan. 1996.
- M. Nejatullah Siddiqi, *Some Aspects of the Islamic Economy*. Delhi: Markazi Maktaba Islam, 1972.
- M. Dawam Rahardjo, Artikel: "Umat," dalam Majalah *Ulumul Qur'an* Vol. III, Jakarta 1992.
- , Artikel: "Fungsionalisasi Zakat dalam Pencapaian Kesejahteraan Sosial" dalam: *Islam dan Kemiskinan*, Bandung: Pustaka, 1988.

- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (an-Nizham al-Iqtishadi), alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. V, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Priyono Tjiptoherijanto, "Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam" dalam: *Islam dan Ke-miskinan*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Satrio Pinandito, (penterjemah), *Psikologi Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994.
- Soenarjo, dkk., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 1998.
- Ziauddin Sardar, *Sains, Teknologi dan Pembangunan di Dunia Islam*, Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1981.

TENTANG PENULIS

Badri Khaeruman, kelahiran Gunung Buntung Padarin-cang Serang, 14 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan dasar (1976) di kampung kelahiran. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan SLTP-SLTA di pesantren Persatuan Islam di kota Bandung (1977-1984). Namun pernah pula belajar setahun (1983) di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Menes, Pandeg-lang-Banten.

Pada tahun 1986 kuliah di Jurusan Tafsir Hadits, Fakul-tas Syari'ah IAIN "SGD" Bandung dan lulus pada tahun 1991, dengan penelitian skripsinya: Analisis terhadap Pemikiran Abu Rayyah Mengenai Abu Hurairah, dalam 'Adwa 'ala al-Sunnah Muhammadiyah.

Di sela-sela mengajar di Fak. Ushuluddin IAIN/UiN Bandung, baru pada tahun 1998 kemudian mengambil prog-ram S2, Konsentrasi Aqidah dan Pemikiran Islam dan lulus pada awal tahun 2002, dengan tesis: *Pembaruan Islam: Melacak Akar Pemikiran Keagamaan Persatuan Islam*, yang kemudian dibukukan dengan judul: *Persatuan Islam Sejarah Pembaruan Pemikiran "Kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah"*.

Sejak tahun 2004-2009 penulis menempuh kuliah S3 Program Studi Hukum Islam. Penelitian Disertasi: *Hukum Islam dalam Tantangan Sosial: Kajian Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam fatwa-fatwanya*. Pascasarjana, UIN Bandung.

Pengalaman menulis artikel keagamaan di media massa dimulai sejak 1991, terutama majalah keagamaan Islam yang terbit Jakarta seperti Panjimas, di Bandung Majalah Risalah dan di Surabaya, al-Muslimun.

Buku-buku penulis yang telah diterbitkan oleh Pustaka Setia, Bandung antara lain: *Sikap Hidup Muslim 2 jilid*, (2002) *Moralitas Islam* (2003), *Mencermati Dakwah Islam*, (2003) *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an* (2004), *Memahami Pesan-pesan al-Qur'an, Perspektif Kontekstual* (2004), *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (2010), dan *Ilmu Hadits* (2010).

Diterbitkan oleh Iris Press Bandung, antara lain: *Politik Ekonomi Kerakyatan Prabowo Subianto* (Iris Press, 2011), dan *Mohammad Jafar Hafsah: Gagasan Indonesia Sejahtera* (Iris Press 2012).

Sementara yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosda-karya Bandung yaitu: *Otentisitas Hadits: Studi Kritis atas Kajian Hadits Kontemporer*, dan sejumlah buku yang diterbitkan Gunung Djati Press, Misaka Galiza Jakarta, Armico Bandung, Kaki Langit Bandung, dan penerbit lainnya. ***

